



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAN DAN
LOYALITAS MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT,
INFAQ DAN SHODAQOH**

(Studi Empiris pada LAZISMU Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh :

EKA DESY SURYANINGSIH

NIM 120810301194

PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2018



**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN
DAN LOYALITAS MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN
ZKAT, INFAK DAN SHODAQOH**

(Studi Empiris pada LAZISMU Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Jurusan Akuntansi (S1) dan mencapai gelar sarjana

Oleh:

EKA DESY SURYANINGSIH

NIM: 120810301194

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2018

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wata'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhingga. Terima kasih atas ridho dan kehendak-Mu sehingga hamba-Mu ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Orang tua yang sangat saya sayangi, Ayahanda M. Suki Asyari dan Ibunda Nur Hasanah yang telah mencurahkan kasih sayang, doa dan semangat, dukungan dan segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan penuh dan nasihat selama ini.
3. Almarhum Nenek dan Kakek yang sangat saya sayangi Aisyah yang telah menjadi orang tua kedua. Terimakasih atas doa, semangat dan dukungan serta nasihat selama ini.
4. Kakak yang sangat saya sayangi Kholilah.
5. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi dorongan semangat, dukungan dan doa dalam pembuatan skripsi ini hingga akhir.
6. Guru-guru SDN Kaligung 01, SMPN 2 Rogojampi, SMK Ihya'Ulumudin dan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, serta dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama ini.
7. Alamamater tercinta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

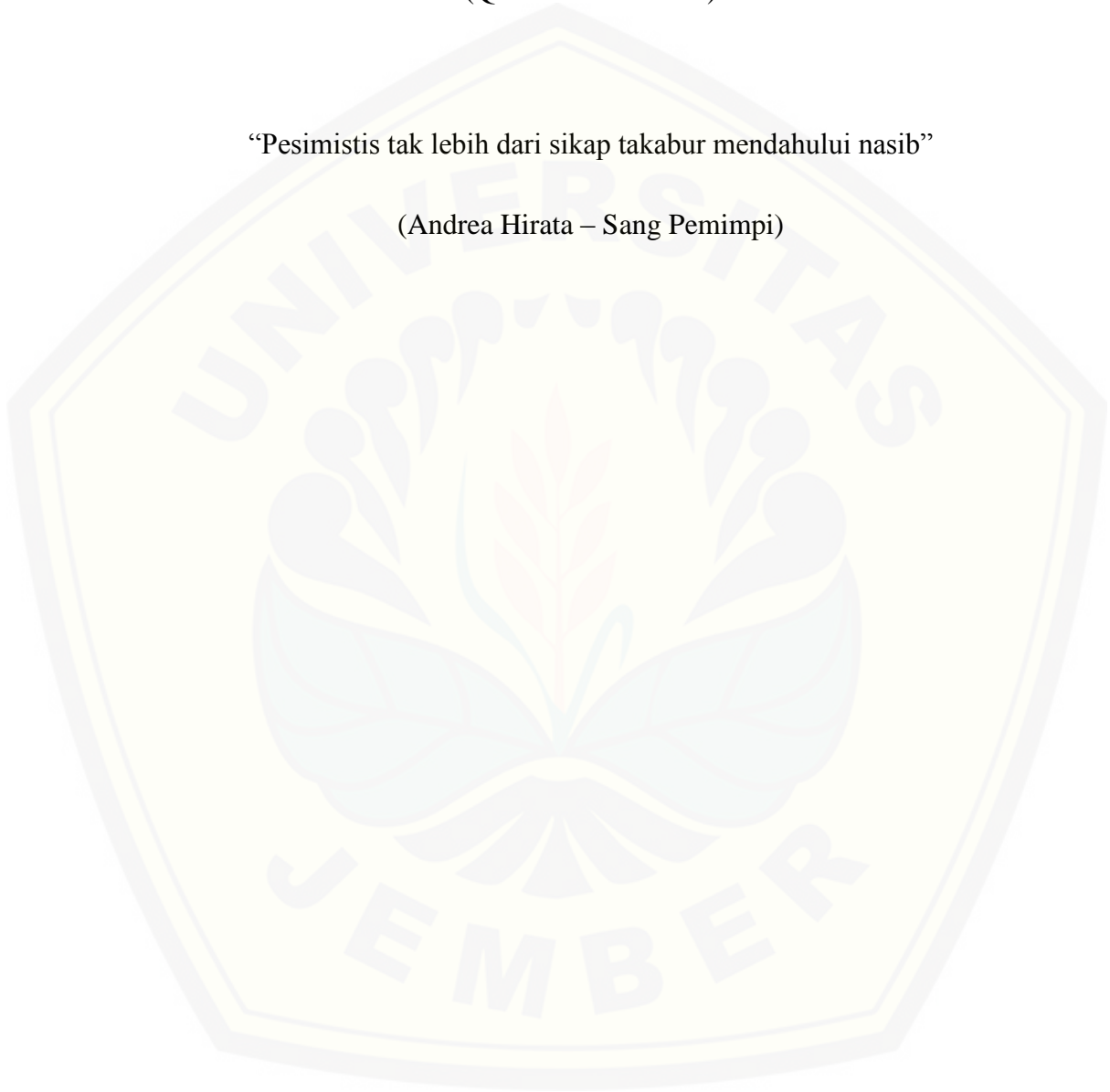
MOTTO

Sungguh nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

(QS Ar-Rahmaan:55)

“Pesimistis tak lebih dari sikap takabur mendahului nasib”

(Andrea Hirata – Sang Pemimpi)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Desy Suryaningsih

NIM : 120810301194

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul "PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember)" adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali kutipan yang saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan kata jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Februari 2018

Yang menyatakan,

Eka Desy Suryaningsih

NIM 120810301194

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Muzakki dalam Menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember)

Nama Mahasiswa : Eka Desy Suryaningsih

NIM : 120810301194

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 11 Oktober 2017

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.
NIP.19700428 199702 1 001

Nur Hisyamuddin S.E., M.SA., Ak.
NIP. 19791014 200912 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19780927 200112 1 002

SKRIPSI

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA
AMIL ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS
MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH**

(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember)

Oleh:

Eka Desy Suryaningsih

NIM. 120810301194

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Ahmad Roziq, SE., MM., Ak

Dosen Pembimbing II : Nur Hisyamuddin, SE., M.SA., Ak

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH (STUDI KASUS PADA LEMBGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KABUPATEN JEMBER)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Eka Desy Suryaningsih

NIM : 12010301194

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

Februari 2018

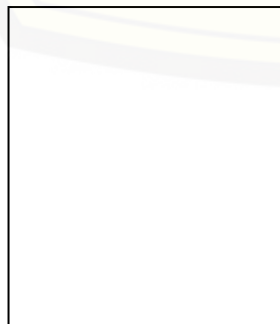
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : _____ (.....)
NIP

Sekretaris : _____ (.....)
NIP

Anggota : _____ (.....)
NIP



Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, SE., M.M., Ak., CA
NIP 19710727 199512 1 001

Eka Desy Suryaningsih

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Abstrak

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat terhadap Kepercayaan dan LOyalitas Muzakki dalam Menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (LAZISMU Jember). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variable, yaitu transparansi, akuntabilitas terhadap kepercayaan dan loyalitas muzakki. Sebagai organisasi non profit lembaga amil zakat dalam meningkatkan pelayanan terhadap muzakki dan calon muzakki, lembaga amil zakat perlu memperhatikan transparansi dan akuntabilitas lembaganya untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh. Dalam penelitian ini, pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas yang diberikan organisasi pengelola zakat kepada muzakki dan calon muzakki dilakukan pada lembaga amil zakat yang telah mempunyai legalitas hukum, organisasi yang mapan dan telah melakukan pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dan berlokasi di wilayah kabupaten jember, serta responden tersebut telah menjadi anggota muzakki minimal selama tiga tahun. Penelitian ini merupakan penelitian *Eksplanatori Research* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesa. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Populasi pada penelitian ini adalah muzakki yang terdaftar minimal selama tiga tahun yang berjumlah 100 responden. Dalam penelitian ini jumlah populasi minimum sebanyak 60 responden yang mewakili. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *Partial Least Square (PLS)* berbasis komponen atau varian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan dan Loyalitas, Lembaga Amil Zakat

Eka Desy Suryaningsih

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Abstract

The Influence Transparency and Accountability in the Amil Zakat Intitution toward Trust and LoyaltyMuzakki in Acomplishing Zakat, Infaq and Shodaqoh(LazismuJember). This study aims to determine the effect of each variable transparency, accountability MuhammadiyahJemberamil zakat institutions of trust and loyalty muzakki. As a non-profit organization, the Institute of Zakat in improving service to candidates muzaki and amil zakat institutions need to pay attention to transparency and accountability of institutions to increase the trust and loyalty muzaki in regular charity, and shodaqohinfaq. In this study, the effect of the transparency and accountability of the given organization zakat to muzakki and prospective muzaki performed on amil zakat institutions already have a legal entity, an organization that is well established and has been managing zakat, infaq and shodaqoh located in the district of Jember, as well as the respondent has been a member muzakki at least three years. This research is an explanatory research Research is research that explains the causal relationship between the study variables with hypothesis testing. Sampling technique used is purposive sampling. The population in this study were enrolled into muzakkii for three years, amounting to 100 respondents. In this study the minimum population size of 60 respondents representative. Data analysis was performed using the method of Partial Least Square (PLS) based components or variants. The results of this study indicate that transparency and accountability significant impact on the trust and loyalty muzaki give charity.

Keywords: *Transparency, Accountability, Trust, Loyalty, theAmil Zakat Intitution*

RINGKASAN

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS MUZAKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH (STUDI KASUS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KABUPATEN JEMBER); Eka Desy Suryaningsih; 120810301194; 103 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Zakat merupakan ibadah yang terdapat pada rukun Islam yang ketiga. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS At Taubah: 60), dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*ashnaf*) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fisabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non profit yang bertujuan untuk membantu umat islam menyalurkan zakat, infak, dan shodaqoh kepada yang berhak. Aktivitas tersebut melibatkan beberapa pihak yang saling berkaitan yakni pemberi zakat, pengelola, dan penerima zakat.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Yulianarti dkk, 2012. Potensi zakat di wilayah Kab. Jember yang terkumpul melalui Lembaga amil zakat pada tahun 2007-2011 sebesar Rp. 7.578.278.000 dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar 47,5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun potensi zakat di wilayah Kab.Jember semakin meningkat. Dengan peningkatan potensi zakat setiap tahunnya diharapkan kualitas pelayanan lembaga amil zakat juga meningkat. Dengan memberikan pelayanan terhadap pihak yang membutuhkan informasi seperti calon muzakki, muzakki dan pihak yang membutuhkan informasi lainnya melalui peningkatan pelayanan, seperti

transparansi dan akuntabilitas diharapkan pihak yang membutuhkan informasi tersebut yakin dan percaya. Sehingga baik calon muzakki maupun muzakki itu sendiri yakin dan loyal untuk menyalurkan dana zakat terhadap lembaga amil zakat tersebut.

Transparansi merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK SAP, 2005). Transparansi lembaga menuntut adanya pertanggungjawaban terbuka, aksesibilitas terhadap laporan keuangan dengan mudah serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja lembaga (Maryati, 2012).

Akuntabilitas dalam organisasi lembaga amil zakat terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan fisik, mental dan spiritual. Pada tingkatan pertama akuntabilitas manajemen Lazis adalah kepada muzakki (orang atau badan yang berhak membayar zakat), munfiq (orang yang mengeluarkan infaq), dan mushaddiq (pengirim atau pengumpul zakat/shodaqoh). Media yang dipergunakan adalah laporan keuangan. Pada tingkatan yang kedua akuntabilitas manajemen Lazis adalah kepada Dewan Penasehat. Media yang dipergunakan adalah laporan kepada Dewan Penasehat. Pada tingkatan ketiga akuntabilitas manajemen Lazis adalah kepada Tuhan. Bentuk akuntabilitas pada tingkatan ini sangat abstrak, karena dilakukan dengan melibatkan dimensi spiritual manajemen, yaitu sifat iksan dan taqwa. (Triyuwono dan Roekhuudin, 2000)

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, kesediaan satu pihak menerima resiko dari pihak lain berdasarkan keyakinan dan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan

sesuai yang diharapkan, meskipun kedua belah pihak belum mengenal satu sama lain.

Loyalitas secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas produk, baik barang maupun jasa tertentu yang merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. (Theresia dan filisia, Jurnal manajemen kewirausahaan 2011)

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai persepsi para muzakki terhadap lembaga amil zakat mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan dan loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infaq dan shodaqah pada lembaga amil zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif/ *explanatori Research* dengan metode survei. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert* yaitu metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju dan ketidak setujuannya terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuisioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Sampel penelitian ini sejumlah 100 muzakki lembaga amil zakat Kabupaten Jember. Responden dalam penelitian ini yaitu muzakki yang sudah menjadi anggota di lembaga amil zakat minimal selama tiga tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara transparansi terhadap kepercayaan muzakki dalam menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh pada Lazismu Jember, terdapat pengaruh positif antara transpaansi terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh pada Lazismu Jember, terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki dalam menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh, terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh pada Lazismu Jember, terdapat pngaruh

positif antara kepercayaan dan loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh pada Lazismu Jember.



PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN ZAKAT, INFAK, DAN SHODAQOH" (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan segala nikmat yang tak terhingga. Terima kasih atas ridho dan kehendak-Mu sehingga hamba-Mu ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.d selaku Rektor Universitas Jember.
3. Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Dr. Yosefa Sayekti S.E., M.Com, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
6. Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. dan Nur Hisyamuddin S.E., M.SA., Ak. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen akuntansi beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

9. Kepala serta jajaran pengurus Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.
10. Kedua orang tuaku, Ayahanda M.Suki Asyari dan Ibunda Nurhasanah yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati mencurahkan cinta, kasih sayang, dukungan, doa, kritik dan saran dalam menjalani penyusunan skripsi ini.
11. Kakakku Kholilah yang sangat saya sayangi dan saya banggakan.
12. Ahmad Arif Ma'ruf yang selalu memberikan dorongan, doa dan semangatnya.
13. Sahabat-sahabat terbaikku (Tutus, Wildan, Sulin, Ulik, Valen).
14. Keluarga KKN 45 Desa Jombang yang telah memberikan banyak pengalaman, kenangan, serta sukacita selama 45 hari.
15. Teman seperjuangan Akuntansi 2011 & 2012, terima kasih atas kerjasamanya selama ini.
16. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena ketidaksempurnaan datang dari manusia dan kesempurnaan hanya datang dari Allah Subhanahu Wata'ala. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. Artinya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 13 Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN BIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xxiv
DAFTAR TABEL	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Grand Theory.....	9
2.1.1 <i>Syariah Enterprise Theory</i>	9
2.2 Konsep Dasar Zakat.....	10
2.2.1 Definisi Zakat	10
2.2.2 Sumber Hukum Zakat.....	11
2.2.3 Syarat Objek Zakat	12
2.2.4 Penerima Zakat dan Bukan Penerima Zakat.....	14
2.2.5 Hikmah dan Manfaat Zakat.....	15

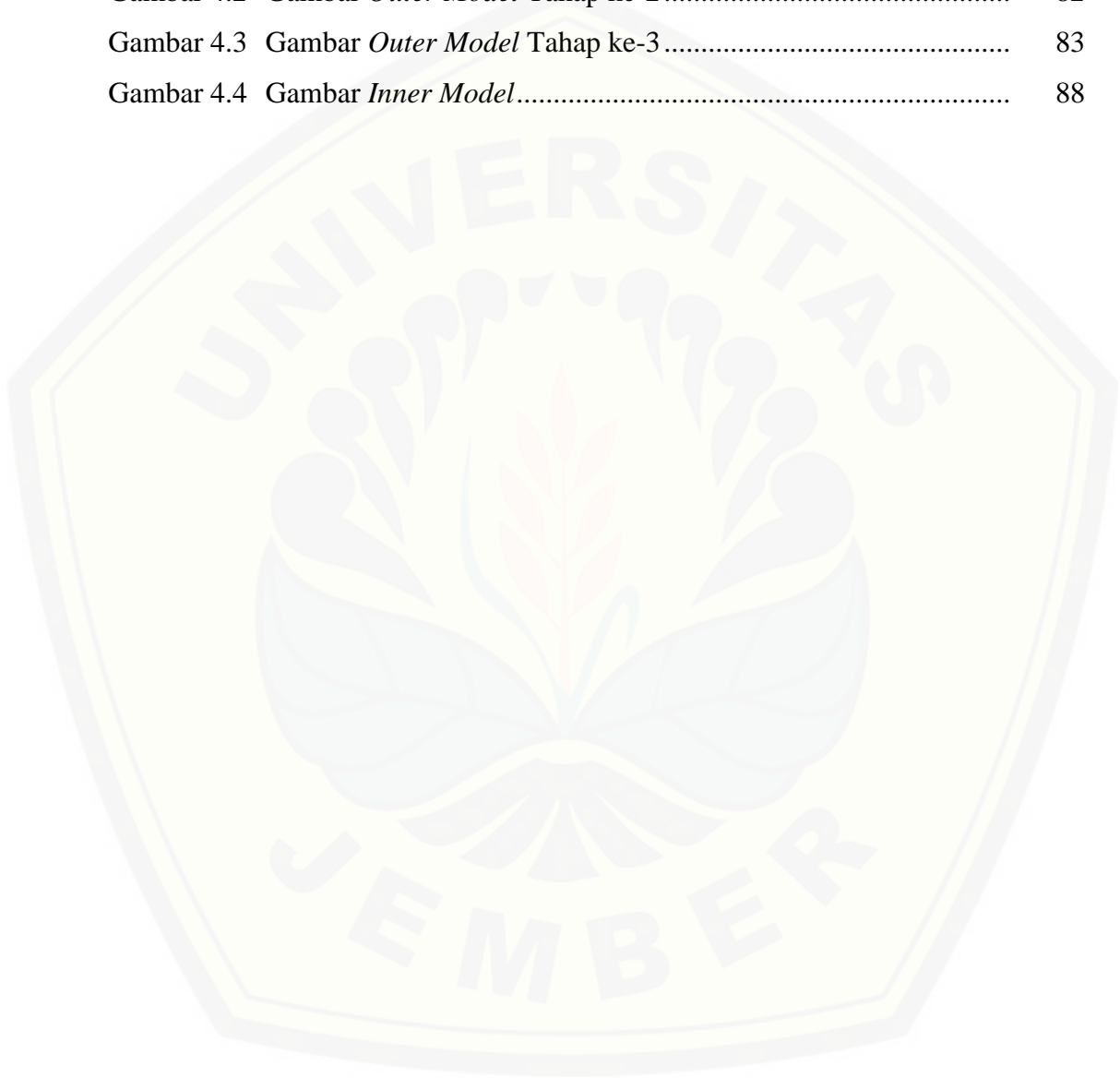
2.3	Tinjauan tentang Organisasi Pengelola Zakat	
2.3.1	Definisi Organisasi Pengelola Zakat.....	16
2.3.2	Asas Organisasi Pengelola Zakat.....	16
2.3.3	Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat.....	17
2.3.4	Tujuan Pengelola Zakat.....	18
2.3.5	Jenis Dana yang Dikelola Organisasi Pengelola Zakat.....	18
2.4	Transparansi.....	19
2.4.1	Definisi Transparansi.....	19
2.4.2	Transparansi dalam Prespektif Islam.....	21
2.5	Akuntabilitas.....	21
2.5.1	Definisi Akuntabilitas.....	21
2.5.2	Bentuk-bentuk Akuntabilitas.....	23
2.5.3	Sifat Akuntabilitas.....	24
2.5.4	Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	26
2.5.5	Macam Akuntabilitas.....	27
2.5.6	Indikator Akuntabilitas.....	29
2.5.7	Akuntabilitas dalam Prespektif Islam.....	29
2.6	Tinjauan tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Shodaqoh (PSAK 109)	
	31
2.6.1	Pengakuan dan Pengukuran.....	31
2.6.2	Penyajian.....	35
2.6.3	Pengungkapan Zakat.....	35
2.6.4	Laporan Keuangan OPZ.....	37
	2.6.4.1 Laporan Posisi Keuangan.....	37
2.7	Kepercayaan.....	40
2.7.1	Definisi Kepercayaan.....	40
2.7.2	Faktor Pendukung Kepercayaan.....	42
2.8	Loyalitas.....	43
2.8.1	Definisi Loyalitas.....	43
2.8.2	Faktor pendukung Loyalitas.....	43
2.9	Penelitian Terdahulu.....	45

2.10	Kerangka Berfikir	50
2.11	Perumusan Hipotesis	53
2.11.1	Pengaruh Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki dalam menunaikan Zakat, Infak, dan Shodaqoh.....	53
2.11.2	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Muzakki dalam menunaikan Zakat, Infak, dan Shodaqoh.....	54
2.11.3	Pengaruh Transparansi terhadap Loyalitas Muzakki dalam menunaikan Zakat, Infak, dan Shodaqoh.....	55
2.11.4	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Loyalitas Muzakki dalam menunaikan Zakat, Infak, dan Shodaqoh.....	56
2.11.5	Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas Muzakki dalam menunaikan Zakat, Infak, dan Shodaqoh.....	58
BAB 3.	METODE PENELITIAN	60
3.1	Jenis Penelitian	60
3.2	Metode Pengumpulan Data	60
3.3	Populasi dan Sampel.....	61
3.4	Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel	62
3.4.1	Variabel Independen (Variabel Eksogen).....	63
3.4.1.1	Kategori Variabel Transparansi.....	63
3.4.1.2	Kategori Variabel Akuntabilitas	63
3.4.2	Variabel Dependen (Variabel Endogen).....	64
3.4.2.1	Kategori Variabel Kepercayaan.....	64
3.4.2.1	Kategori Variabel Loyalitas	65
3.5	Teknik Penyajian dan Analisis Data.....	66
3.5.1	Metode Statistik Deskriptif.....	66
3.5.2	Pengujian Hipotesis	66
3.5.2.1	Evaluasi <i>Outer Model</i> (Model Pengukuran).....	67
3.5.2.2	Evaluasi <i>Inner Model</i> (Model Struktural).....	68
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	69
4.1.1	Sejarah LAZISMU Jember	79

4.1.2	Visi dan Misi LAZISMU	70
4.1.3	Program LAZISMU	70
4.1.4	Struktur Organisasi LAZISMU	71
4.1.5	Proses pengumpulan dana ZIS oleh LAZISMU	71
4.1.6	Proses Penyaluran dana ZIS oleh LAZISMU	72
4.1.7	Penyajian Laporan Keuangan LAZISMU	74
4.1.8	Audit Laporan Keuangan	75
4.2	Pemilihan Sampel	75
4.3	Statistik Deskriptif	76
4.3.1	Statistik Deskriptif Responden	70
4.3.2	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	79
4.4	Pengujian Hipotesis	79
4.4.1	Analisis <i>Outer Model</i> (Model Pengukuran)	80
4.4.1.1	Hasil Uji <i>Convergent Validity</i>	84
4.4.1.2	Hasil Uji <i>Discriminant Validity</i>	85
4.4.1.3	Hasil Uji <i>Average Variance Extracted(AVE)</i>	86
4.4.1.4	Analisis <i>Composite Reability</i>	86
4.4.2	Analisis <i>Inner Model</i> (Model Struktural)	87
4.4.2.1	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	88
4.4.2.2	<i>R-Square</i>	91
4.5	Pembahasan Hasil Penelitian	91
4.5.1	Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan	91
4.5.2	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan	93
4.5.3	Pengaruh Transparansi terhadap Loyalitas	95
4.5.4	Pengaruh Akuntabilitas terhadap Loyalitas	96
4.5.5	Pengaruh Kepercayaan terhadap Loyalitas	98
BAB 5.	PENUTUP	101
5.1	Simpulan	101
5.2	Keterbatasan	102
5.3	Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Model Penelitian	51
Gambar 4.1 Gambar <i>Outer Model</i> Tahap ke-1	80
Gambar 4.2 Gambar <i>Outer Model</i> Tahap ke-2	82
Gambar 4.3 Gambar <i>Outer Model</i> Tahap ke-3	83
Gambar 4.4 Gambar <i>Inner Model</i>	88



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	46
Tabel 2.3	Kerangka Konseptual	51
Tabel 4.1	Statistik Deskriptif Demografi Responden	76
Tabel 4.2	Rekapitulas Statistik Deskriptif Penelitian.....	78
Tabel 4.3	Hasil <i>Outer Model</i>	84
Tabel 4.4	Hasil <i>Cross Loadings</i>	85
Tabel 4.5	Hasil <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	86
Tabel 4.6	Hasil <i>Composite Reliability</i>	87
Tabel 4.7	Hasil <i>Path Coefisients</i>	89
Tabel 4.8	Hasil <i>R-Square</i>	91

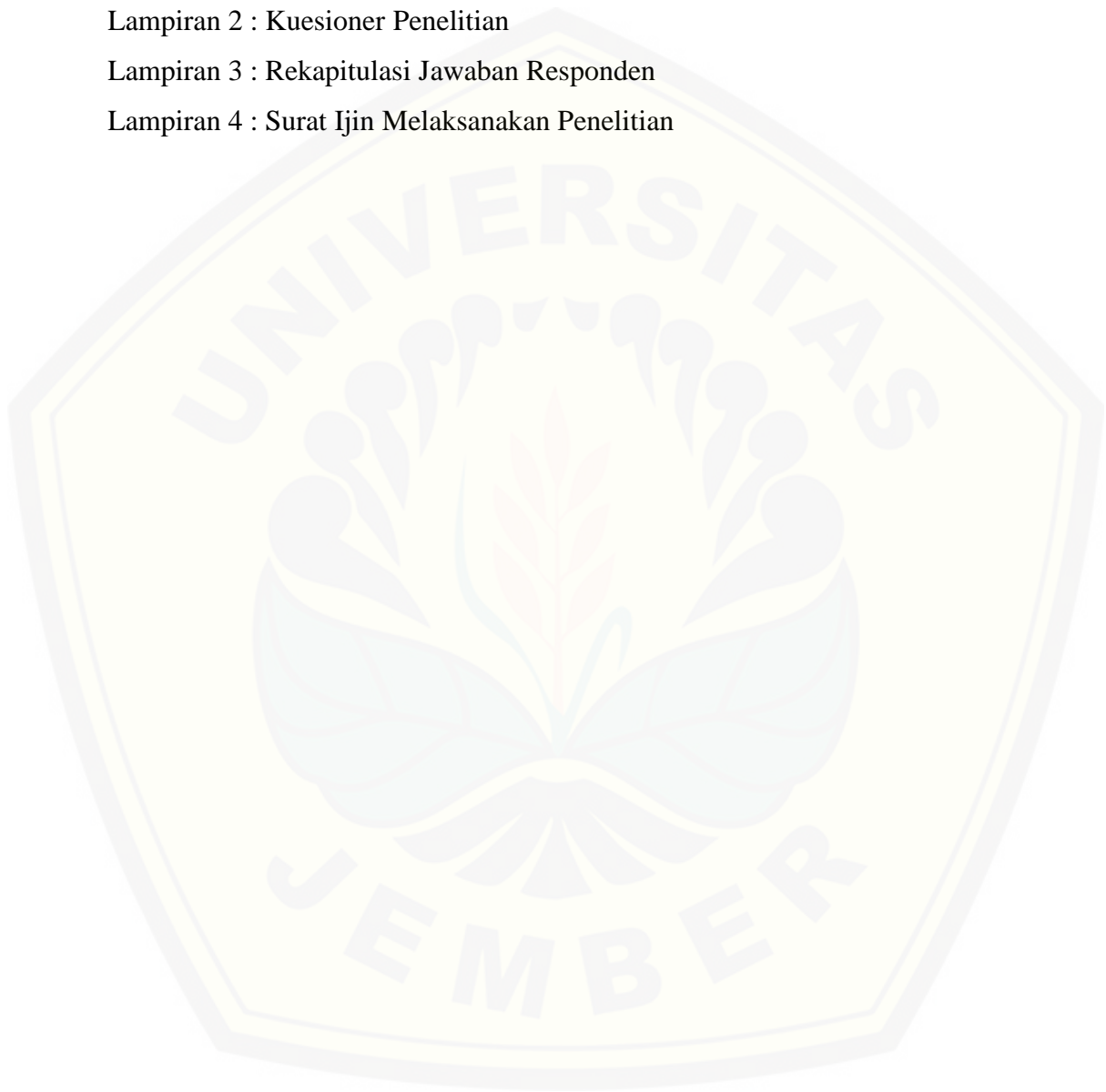
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar anggota Muzakki Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Jember yang menjadi anggota sekurang-kurangnya selama 3 tahun

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian

Lampiran 3 : Rekapitulasi Jawaban Responden

Lampiran 4 : Surat Ijin Melaksanakan Penelitian



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan para muzakki untuk tidak menyalurkan zakat, infaq dan shodaqoh pada organisasi pengelola zakat yang ada. Faktor kepercayaan yang masih rendah pada organisasi tersebut sehingga menyebabkan para muzaki lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mereka yang berhak. Faktor ketidakpercayaan muzaki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada Laporan Keuangan, Akuntabilitas dari pihak BAZ dan LAZ.

Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh. Definisi menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat sebagai instrument pengentasan kemiskinan memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada. Penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (QS At Taubah: 60), dimana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*ashnaf*) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang berhutang, jihad fisabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat.

Tugas utama LAZ menerima dan mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh dari masyarakat serta menyimpannya untuk disalurkan kepada mereka yang berhak menerima. Dalam proses pengumpulan, penyaluran dan penyimpanan zakat, infaq, dan shodaqoh perlu adanya pencatatan transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan, mempublikasikan laporan keuangan yang

telah diaudit melalui media massa dalam hal ini proses transparansi dan akuntabilitas diterapkan dan menyerahkan laporan kepada pemerintah.

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan menerima informasi yang diperoleh oleh masyarakat. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik harus secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan aktivitasnya, suatu organisasi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Transparansi Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu *Tabligh*, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS Al Maidah ayat 67 “*Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya*”. Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Organisasi Pengelola Zakat harus memegang teguh aturan Allah, selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi. (Dina Fitriana, 2010).

Akuntabilitas Laporan Keuangan dapat dianalogikan sebagai suatu sifat dan sikap organisasi pengelola zakat yaitu *Amanah*, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS An Nisa’ ayat 58, “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.*” Dalam ayat tersebut tersirat bahwa Organisasi Pengelola Zakat harus dapat dipercaya dalam melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian dana ZIS kepada mereka yang berhak.

Pertanggung jawaban publik/akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah satu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh organisasi pengelola zakat. Karena organisasi pengelola zakat sebagai lembaga publik yang terikat dengan aturan publik yang diikutinya yaitu menganut prinsip *Good Corporate Governance (CGC)*. Kesadaran para pengelola zakat terhadap masalah ini untuk

waktu sekarang sangat mutlak, karena dengan banyaknya organisasi pengelola zakat masih banyak yang belum membuat laporan yang sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Pesatnya pertumbuhan Organisasi Pengelola Zakat ditengah besarnya potensi zakat yang ada merupakan sebuah langkah awal yang baik untuk memperbaiki pengelolaan zakat. Abubakar dan Chaider (2006) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp. 5,1 triliun dalam bentuk barang dan Rp. 14,2 triliun dalam bentuk uang tunai. Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh *Public Interest Research and Advocacy Centre* (PIRAC) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp 4,45 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 9,09 triliun pada tahun 2007. Fakhruddin dalam (Ramadhita, 2012) juga menyebutkan bahwa dalam penelitian terbaru BAZNAS pada tahun 2011, potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 triliun yang terdiri dari Rp. 82,7 triliun potensi zakat rumah tangga, Rp. 2,4 triliun potensi zakat BUMN, dan Rp. 17 triliun potensi zakat tabungan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Yulianarti dkk, 2012. Potensi zakat di wilayah Kab. Jember yang terkumpul melalui Lembaga amil zakat pada tahun 2007-2011 sebesar Rp. 7.578.278.000 dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar 47,5%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahun potensi zakat di wilayah Kab.Jember semakin meningkat. Dengan peningkatan potensi zakat setiap tahunnya diharapkan kualitas pelayanan lembaga amil zakat juga meningkat. Dengan memberikan pelayanan terhadap pihak yang membutuhkan informasi seperti calon muzakki, muzakki dan pihak yang membutuhkan informasi lainnya melalui peningkatan pelayanan, seperti transparansi dan akuntabilitas diharapkan pihak yang membutuhkan informasi tersebut yakin dan percaya. Sehingga baik calon muzakki maupun muzakki itu sendiri yakin dan loyal untuk menyalurkan dana zakat terhadap lembaga amil zakat tersebut.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa potensi zakat dan perkembangan Organisasi Pengelola Zakat cukup besar. Ironisnya, tidak semua potensi zakat

teralisasi dan terdistribusi dengan baik karena Organisasi Pengelola Zakat tidak mampu mengumpulkan semua potensi zakat tersebut. Pada tahun 2011, jumlah zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS se-Indonesia adalah 39 miliar rupiah dari 217 triliun rupiah (basnaz.or.id).

Dari rincian diatas dapat kita lihat bahwa faktor utama yang menyebabkan rendahnya optimalisasi zakat adalah rendahnya rasa percaya masyarakat terhadap kualitas pengelolaan zakat oleh organisasi pengelola zakat maupun lembaga amil zakat. Rasa kurang percaya terhadap amil zakat membuat muzakki lebih memilih menghitung dan mendistribusikan sendiri zakatnya. Rasa kurang percaya ini didorong oleh pandangan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi Organisasi Pengelola Zakat. Masyarakat menganggap bahwa akuntabilitas dan transparansi OPZ masih rendah. Padahal, dengan menyalurkan zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat, tingkat ketepatan pendistribusian zakat kepada mustahik lebih baik dibandingkan dengan penyaluran zakat secara individu, dimana muzakki terkadang salah menafsirkan siapa saja yang berhak menerima zakat.

Optimalisasi penghimpunan zakat akan bisa tercapai apabila Organisasi Pengelola Zakat mampu menepis keraguan para muzakki mengenai kualitas pengelolaan zakat di Organisasi Pengelola Zakat . Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas layanan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pandangan muzakki dan amil zakat dan apakah akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi tingkat kepercayaan dan loyalitas muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“ Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat, Infak , dan Shodaqoh Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Muzakki dalam Menunaikan Zakat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan Muzzaki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember?
2. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember?
3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember?
4. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember?
5. Apakah Kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, tujuan penelitian ini untuk adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember
2. Untuk mengetahui apakah Transparansi berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember
3. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember
4. Untuk mengetahui apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember

5. Untuk mengetahui apakah kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh pada LAZISMU Kab. Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam pengembangan konsep atau teori dalam perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi syariah, khususnya yang terkait dengan kualitas pelayanan organisasi pengelola zakat terhadap kepercayaan dan loyalitas muzakki dalam menunaikan dana ZIS

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi :

- a. Perusahaan
Dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan agar muzakki percaya dan loyal dalam menunaikan zakat
- b. Masyarakat/muzakki
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi muzakki maupun calon muzakki, dalam pengambilan keputusan mengenai apakah menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat atau mendistribusikan sendiri zakatnya.
- c. Akademisi
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.3 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN. Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini adalah gambaran awal dari apa yang akan dilakukan peneliti.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Bab tinjauanpustaka membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini. Selain itu, bab ini juga menjelaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuat kerangka pemikiran dan juga menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN. Bab metode penelitian menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumberdata, serta metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya menerangkan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN. Bab hasil dan pembahasan menjelaskan deskripsi objek penelitian. Bab ini juga menjelaskan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP. Bab penutup berisi kesimpulan penelitian yang didapat dari pembahasan Bab IV. Dengan diperolehnya kesimpulan dalam penelitian ini, maka bab ini juga memberikan penjelasan mengenai implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Syariah Enterprise Theory*

Syariah enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. Menurut Triyuwono (2007: 4), *Enterprise theory* merupakan teori yang mengakui adanya pertanggung jawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. *Enterprise theory* kemudian dikembangkan agar teori tersebut lebih dekat lagi dengan konsep syariah sehingga terbentuk teori yang dikenal dengan istilah *Syariah enterprise theory*. Menurut Triyuwono (2007:4), *syariah enterprise theory* meliputi Allah, manusia, dan alam sehingga dalam penelitian ini mengimplikasikan bahwa *stakeholder* tertinggi adalah Allah sebagai pusat.

Allah merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia dimana dengan menempatkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah.

Stakeholder kedua dari *Syariah Enterprise Theory* adalah manusia yang dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. *Indirect-stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

Golongan *stakeholder* terakhir dari *Syariah Enterprise Theory* adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energi yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan sebagainya.

2.2 Konsep Dasar Zakat

2.2.1 Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki banyak arti. Ibnu, Arabi menjelaskan pengertian zakat dalam beberapa istilah seperti *nama*="kesuburan karena dengan zakat maka Allah akan mendatangkan kesuburan pahala, *thaharah*=kesucian karena merupakan suatu kenyaan jiwa yang suci dari kikir dan dosa, *barakah*= keberkatan, dan juga *tazkiyah*, *tathier*= mensucikan (Ash Shiddieqy, 2005:3). Dikatan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkan diri dari segala kerusakan. Secara syar'i, zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu yang berhak menerima sesuai dengan yang ditetapkan dalam AlQur'an sebagai bentuk ibadah dan ketaatan terhadap Allah (Syahatah, 2004:4).

Taqiyuddin Abu bakar dalam bukunya *Kifayahal-Akhyar* mendefinisikan zakat sebagai sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Qarawi dalam Faisal (2011:244) menambahkan bahwa jumlah tersebut dikatan zakat karena jumlah tersebut menambah kekayaan, membuatnya lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2011, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

Dari berbagai definisi zakat baik dari segi bahasa dan istilah, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah *Subhanahu waTa'ala* dimana umat muslim diwajibkan untuk memberikan harta pada jumlah tertentu kepada yang memerlukan sesuai dengan syariat

Islam yang telah ditetapkan dalam AlQur'an dan Hadist.

Setelah mengetahui definisi zakat, ada baiknya jika kita membedakan antara zakat, infak dan shodaqoh. Seperti yang telah dipaparkan bahwa zakat diberikan kepada orang tertentu dengan jumlah tertentu dan waktu tertentu. Infaq berarti mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan bukan zakat. Infaq terdiri atas infak wajib seperti kafarat, nadzar serta zakat, dan infak sunnah seperti infak bencana alam dan sebagainya. Sedangkan shodaqoh memiliki makna yang lebih luas karena shodaqoh dapat berupa infaq, zakat, dan kebajikan (Ar Rahman, 2003: 8).

2.2.1 Sumber Hukum Zakat

1. Al Qur'an

Kata zakat dalam Al Qur'an disebutkan sebanyak tiga puluh kali, delapan diantaranya terdapat dalam surah Makiyah. Kata zakat disandingkan dengan kata shalat sebanyak 28 kali (Ash Shiddieqy, 2005:4). Dari jumlah ini, dapat kita interpretasikan bahwa perintah zakat sama pentingnya dengan perintah shalat.

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah zakat dan instruksi pelaksanaannya, antara lain :

- a. QS. Al Bayyinah *"Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus."* (QS. Al Bayyinah: 5).
- b. QS. At Taubah *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketemtraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At Taubah: 103).
- c. QS. Al Isra *"Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros."* (QS. Al Isra: 26).

2. Hadits

Adapun hadits yang menjelaskan mengenai perintah zakat antara lain:

a. Hadits riwayat Abu Hurairah

Rasulullah bersabda, "Siapa yang dikarunia Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan menakutkan dengan dua bintik diatas kedua matanya." (HR. Bukhari)

b. Hadits riwayat Muslim

Rasulullah bersabda, "Tidak ada seorangpun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya yaitu beberapa keping api meraka, setelah dipanaskan, digosoklah lambungnya, dahinya belakangnya dengan kepingan itu; setiap setipa dingin dipanaskan kembali dan pada suatu hari 50 ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hambanya ."

c. Hadits riwayat Bukhari

Rasulullah bersabda, "Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang satu, maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai kapanpun. Zakat atas emas murni (riqqah) adalah seperempat dari sepersepuluh, jika tidak memiliki emas murni kecuali sekadarnya, maka tidak ada zakatnya hingga kapanpun."

3. Ijma' Ulama

Pendapat para ulama, baik yang menuntut ilmu secara langsung dari Rasulullah maupun tidak merupakan salah satu sumber hukum. Para ulama telah sepakat bahwa zaka tmerupakan kewajiban sehingga mengingkarinya berarti kafir.

2.2.2 Syarat Objek Zakat

Tidak semua harta kekayaan yang dimiliki merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya .Adabeberapa syarat yang harus dimiliki oleh harta kekayaan untuk kemudian dinyatakan sebagai objek zakat, yaitu :

1. Halal, harta yang akan dizakatkan harus diperoleh dengan cara yang baik dan halal, dalam hal ini sesuai dengan tuntunan syariah. Sebagaimana perintah Allah *SubhanahuwaTa"ala* dalam QS. Al Baqarah ayat 267 yang artinya ; "Hai

orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2. Milik penuh. Harta yang dizakatkan haruslah merupakan milik pribadi muzakki, dimana muzakki memiliki hak untuk menyimpan, memakai, dan mengelolanya, dan didalamnya tidak terdapat hak orang lain.
3. Berkembang. Beberapa ulama menyebutnya sebagai harta yang produktif, artinya harta tersebut senantiasa bertambah baik secara nyata atau tidak. Bertambah secara nyata adalah harta yang bertambah karena penggunaan aset, atau perdagangan, baik oleh diri muzakki sendiri atau melalui orang lain. Bertambah secara tidak nyata maksudnya harta tersebut berpotensi untuk bertambah baik (Ar Rahman, 2003: 22).
4. Cukup nisab
Harta yang dizakatkan harus mencapai nisab, atau jumlah minimal yang menyebabkan harta yang terkena kewajiban untuk dizakatkan (Ash Shiddieqy, 2005:37)
5. Cukup Haul. Harta yang wajib zakat harus melewati haul atau satu tahun sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu, alaihi wassallam,*” Tidak ada zakat atas suatu kekayaan sampai berlalu satu tahun” (HR Ad-Daruquthni dan Baihaqi). Namun zakat pertanian, buah-buahan, rilaz, dan sejenisnya dizakati pada saat panen atau saat mendapatkannya (Ash-Syahatah, 2004:11). Hal ini sejalan dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam QS. Al An’am ayat 141 yang artinya, ”Dan hendaklah kamu serahkan haknya waktu pemotongan”.
6. Bebas dari Utang
Zakat hanya dikenakan pada orang yang telah bebas dari hutang karena orang yang memiliki hutang (*gharimin*) termasuk kedalam orang yang wajib dizakati. Harta yang dizakati harus bersih dari hutang. Hal ini digambarkan Rasulullah *Shallallahu, alaihi wassallam,*”Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang

kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat.”(HR.Bukhari).

2.2.3 Penerima Zakat dan yang Bukan Penerima Zakat

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang (*gharimin*), untuk jalan Allah (*fii sabilillah*), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnusabil*), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS.AtTaubah:60)

Berdasarkan penggalan ayat diatas, kita dapat melihat bahwa terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu :

1. Fakir adalah golongan yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.
2. Miskin adalah golongan yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan, namun tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan tanggungannya
3. *Amil* adalah orang yang ditunjuk dan bekerja mengurus segala hal yang terkait dengan zakat seperti mendata mustahik dan muzakki, mengurus, menjaga, dan mengatur administrasi zakat serta menyalurkan zakat ke mustahik.
4. *Muallaf* adalah golongan yang di dalam hatinya ada harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat terhadap kaum muslim, dan orang yang baru memeluk islam.
5. *Riqab* adalah budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik. Mencakup juga muslim yang ditawan oleh kaum kafir.
6. *Gharimin* adalah orang yang memiliki hutang, dan terpaksa memiliki hutang yang tidak digunakan untuk berbuat maksiat, namun tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut.
7. *Fii Sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah ini bukan hanya yang sekedar ikut berperang secara fisik untuk membela

Agama Islam, namun juga mereka yang berperanaktif untuk menyebarkan Islam seperti membangun masjid, memberikan pengajaran agama, dan sebagainya.

8. *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh (*musafir*) dan perjalanannya itu bukan untuk kemaksiatan, namun untuk hal yang baik seperti mencari rezeki, mencari ilmu, melaksanakan ibadah, dan berperang di jalan Allah.

Adapun orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat adalah:

- a. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan. Sebagaimana sabda Rasulullah, “Tidak halal mengambil sedekah (zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan.” (HR. Bukhari)
- b. Orang yang masih kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, termasuk di dalamnya hamba sahaya.
- c. Orang kafir
- d. Orang yang berada dalam tanggungan wajib zakat.
- e. Keturunan Rasulullah. Sebagaimana sabda Rasulullah, “Sesungguhnya tidak halal bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat).” (HR. Muslim).

2.2.4 Hikmah dan Manfaat Zakat

Allah *SubhanahuwaTa'ala* berfirman dalam QS. At Taubah ayat 103, yang artinya, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman (2003) menyebutkan bahwa hikmah di keluarkannya perintah zakat adalah:

1. Mampu memperbaiki kedudukan masyarakat dari segi moral dan material karena melalui pendistribusian zakat, maka setiap anggota masyarakat akan menjadi satu sehingga persaudaraan antar muslim semakin kuat.
2. Membersihkan jiwa dari sifat kikir dan *bakhil*.
3. Dapat menjadi benteng keamanan dalam sistem ekonomi Islam sekaligus menjadi stabilisator dalam kehidupan sosial.
4. Merupakan penyebab turunnya rahmat Allah *SubhanahuwaTa'ala*.

Ditinjau dari sisi ekonomi, zakat dapat merangsang pemilik harta untuk untuk senantiasa berbuat amal kebajikan dan semakin giat dalam memproduksi karena semakin banyak harta yang dimiliki, semakin besar zakat yang harus dikeluarkan, dan semakin besar ridha yang akan didapatkan. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.3 Tinjauan tentang Organisasi Pengelola Zakat

2.3.1 Definisi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan *shadaqah*, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Menurut UUNo. 23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat." Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Organisasi Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.

2.3.2 Asas Organisasi Pengelola Zakat

Sebagai sebuah organisasi, Organisasi Pengelola Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UUNo. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas Organisasi Pengelola Zakat adalah:

1. Syariat Islam dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Organisasi pengelola zakat haruslah berpedoman sesuai syariat islam, mulai dari tlatla cara perekrutan pegawai hingga tlatla cara pendistribusian zakat.
2. Amanah. Organisasi pengeoa zakat haruslah menjadi organisasi yang dapat

dipercaya.

3. Kemanfaatan. Organisasi Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
4. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, Organisasi Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

2.3.3 Karakteristik Organisasi Pengelola Zakat

Sudewo dalam Mahmudah (2007) menyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga *not for profit*. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.

Melihat tugas dan fungsi Organisasi Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Organisasi Pengelola Zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, Organisasi Pengelola Zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu :

1. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada OPZ dengan harapan bias memperoleh hasil yang mereka harapkan.
2. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
3. Kepemilikan OPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. OPZ bukanlah milik

pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumberdayanya berasal dari masyarakat. Jika OPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka OPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

1. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam
2. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.

2.3.4 Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah OPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, OPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

2.3.5 Jenis Dana yang Dikelola Organisasi Pengelola Zakat

OPZ menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu :

- a. Dana Zakat. Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh OPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada OPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak

yatim, dan sebagainya.

- b. Dana Infaq/Shadaqah. Seperti dana zakat, dana infaq/shadaqah terdiri atas dana infaq/shadaqah umum dan dana infaq/shadaqah khusus. Dana infaq/shadaqah umum adalah dana yang diberikan para donator kepada OPZ tanpa persyaratan apapun. Sedangkan dana infaq/shadaqah dikhususkan adalah dana yang diberikan para donator kepada OPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.
- c. Dana Waqaf. Waqaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.
- d. Dana Pengelola. Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari :
 1. Hak amil dari dana zakat
 2. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
 3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

2.4 Transparansi

2.4.1 Definisi Transparansi

Transparansi merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK SAP, 2005). Transparansi lembaga menuntut adanya pertanggungjawaban terbuka, aksesibilitas terhadap laporan keuangan dengan mudah serta adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja lembaga (Maryati, 2012).

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Ada beberapa pengertian tentang transparansi yaitu:

Menurut Andrianto (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah

keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumberdaya publik.

Menurut Hafiz (2000) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo dalam Maryati (2012) menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap
3. Kemudahan akses informasi
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non pemerintah.

KNKG(2006:5) menyatakan bahwa transparansi adalah suatu keadaan dimana perusahaan mampu menyediakan informasi material dan relevan terkait dengan perusahaan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemegang kepentingan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah suatu bentuk keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut sehingga semua pihak yang terlibat mengetahui apa yang dilakukan oleh organisasi, termasuk prosedur, dan keputusan yang diambil oleh organisasi

dalam pelaksanaan urusan publik atau kegiatannya.

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak *muzakki* maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir. (sholahuddin, ekonomi islam 2006).

2.4.2 Transparansi dalam Perspektif Islam

Tapanjeh (2009 :563) mengemukakan bahwa konsep transparansi dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah. Dari konsep transparansi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, transparansi erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

2.5 Akuntabilitas

2.5.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991).

Secara umum, akuntabilitas dapat dipandang sebagai hubungan yang meliputi "pemberian dan penerimaan" alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak yang terlibat dan berkepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk

meminta dan memberi penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima dan dilakukan. Sehingga, akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab perusahaan dan hak pemegang kepentingan (Rahman, 1998:57).

Menurut Triyuwono dan Roekhuudin (2000) mengenai pemahaman akuntabilitas manajemen sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (Lazis) di Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi Lazis terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan fisik, mental dan spiritual. Pada tingkatan pertama akuntabilitas manajemen Lazis adalah kepada muzakki (orang atau badan yang berhak membayar zakat), munfiq (orang yang mengeluarkan infaq), dan mushaddiq (pengirim atau pengumpul zakat/shodaqoh). Media yang dipergunakan adalah laporan keuangan. Pada tingkatan yang kedua akuntabilitas manajemen Lazis adalah kepada Dewan Penasehat. Media yang dipergunakan adalah laporan kepada Dewan Penasehat. Pada tingkatan ketiga akuntabilitas manajemen Lazis adalah kepada Tuhan. Bentuk akuntabilitas pada tingkatan ini sangat abstrak, karena dilakukan dengan melibatkan dimensi spiritual manajemen, yaitu sifat iksan dan taqwa.

Akuntabilitas (*accountability*) menurut Suherman (2007) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan informasi termasuk informasi keuangan sebagai wujud tanggung jawab organisasi (Greyet.al.,1996 dalam sKholmi, 2012:67)

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Dari berbagai definisi akuntabilitas yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk laporan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan

organisasi dalam periode tertentu.

2.5.2 Bentuk-bentuk Akuntabilitas

Akuntabilitas dibedakan menjadi beberapa tipe, diantaranya menurut Rosjidi (2001) dalam Rahamannurrasjid (2008), jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe yaitu:

1. Akuntabilitas Internal

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal penyelenggara pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodic maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Intansi Pemerintah (AKIP).

2. Akuntabilitas Eksternal

Melekat pada setiap lembaga Negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal lingkungannya.

Saleh dan Iqbal (1995) dalam Rahmannurrasjid (2008) berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Dari sisi internal seseorang, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal seseorang adalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkuannya baik lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Sedangkan menurut mardiasmo (2009) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertikal accountability*), yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*), yaitu

pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

2.5.3 Sifat Akuntabilitas

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada masyarakat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administrasi
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perpektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Akuntabilitas hokum (*Probility and legality accountability*). Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*)
2. Akuntabilitas Proses (*Process accountability*). Dalam hal ini digunakan proses, prosedur atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).
3. Pelaksanaan Akuntabilitas (*Performance accountability*). Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).
4. Akuntabilitas Program (*Program accountability*) Disini akan disoroti

penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*)

5. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*). Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*)

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya Akuntabilitas dan Good Governance (2000;24), membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.

- a. Integritas Keuangan: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas berarti kejujuran, keterpaduan, kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuangan mencerminkan kejujuran penyajian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Pengungkapan: Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan gambaran atau kenyataan dari kejadian ekonomi yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.
- c. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan: Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari kegiatan pemerintah. Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, tapi sampai outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur dari hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur output dan dampak yang dihasilkan. Peran restpektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang.

3. Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif pada kondisi sosial masyarakat. Akuntabilitas procedural yaitu merupakan pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan

2.5.4 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan akuntabilitan dalam lingkungan pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti dikutip LAN dan BPKP (2000;43) yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan

manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Agar dapat berfungsi dengan baik, dalam menerpakan suatu system akuntabilitas, perlu diterapkan:

1. Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran dari kebijakan dan program. Hal terpenting dalam membentuk suatu system akuntabilitas adalah mengembangkan suatu pertanyaan tujuan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan yang dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengukurannya. Untuk itu diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur.
2. Pola pengukuran tujuan. Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasi, perlu ditetapkan suatu indikator kemajuan dengan mengarah pada pola pencapaian tujuan dan hasil. Ini adalah tugas yang paling kritis dan sangat sulit dalam menyusun suatu system akuntabilitas. Memilih indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan sasaran program membutuhkan cara-cara dan metode tertentu agar indikator terpilih dan mencapai hal yang dibagikan oleh pembuat kebijakan.
3. Pengakomodasian sistem insentif. Pengakomodasian system yang insentif merupakan suatu sistem yang perlu disertakan dalam system akuntabilitas. Penerapan sistem intensif akan mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan.
4. Pelaporan dan penggunaan data. Suatu system akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak. Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pimpinan, pembuat keputusan, manajer-manajer program dan masyarakat. Bentuk dan isi laporan harus dipertimbangkan sedemikian rupa, ini merupakan pedoman pelaporan informasi dalam suatu sistem akuntabilitas.

2.5.6 Macam Akuntabilitas

Dalam akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya

akuntabilitas vertical (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) yang mempunyai definisi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapat otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsive, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan

pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh memperoleh manfaat dan dampak (negative) atas kebijakan tersebut.

2.5.7 Indikator Akuntabilitas

Dari dimensi akuntabilitas yang telah dijelaskan sebelumnya yang bersumber dari (Hopwood dan Tomkins, 1984, Elwood, 1993) dimensi tersebut dapat diturunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

- a. Kepatuhan terhadap hukum
- b. Penghindaran korupsi dan kolusi

2. Akuntabilitas Proses

- a. Adanya kepatuhan terhadap prosedur
- b. Adanya pelayanan publik responsive
- c. Adanya pelayanan publik yang cermat
- d. Adanya pelayanan publik yang biaya murah

3. Akuntabilitas Program

- a. Alternative yang memberikan hasil yang optimal
- b. Mempertanggung jawabkan yang telah dibuat

4. Akuntabilitas Kebijakan

Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil

2.5.8 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta, Allah *SubhanahuwaTa'ala*. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada

Allah. Allah berfirman dalam QS. AnNisaa“Ayat30 yang artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini mengandung arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran (Mahmud dalam Kholmi, 2012). Allah juga berfirman dalam QS. Fathirayat 39 yang artinya “Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah dibumi. ”Ini berart imanusia diperintahkan sebagai khalifah untuk mengelola bumi dan melaksanakan perintahnya. Khalifah artinya pengemban amanah mulia dari Allah. Amanah ini kemudian harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al Faruqi dalam Kholmi (2012) menegaskan bahwa tanggung jawab adalah implikasi keimanan.

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peransosial dimana *Muhtasib* (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh, 2009:257).

Triwuyono dalam Kholmi (2012 :7) mengemukakan konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan *principle* tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yanglain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan. Namun, akhir dan tujuan utama dari kedua pertanggungjawaban tersebut adalah Allah. Tapanjeh (2009:257) mengemukakan konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

1. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai

seorang khalifah.

2. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Rahman (1998) juga menambahkan bahwa dalam Islam, akuntabilitas berarti bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Selain itu, akuntabilitas juga berarti setiap orang harus menerima semua kewajiban dan hak sesuai dengan untuk apa mereka diberikan amanah. Ketika seseorang menggunakan kemampuannya untuk kepentingan diluar dari tujuan utama atas pemberian amanah tersebut, maka ia telah gagal dalam mempertanggungjawabkan amanahnya. Akuntabilitas harus dibarengi dengan pengendalian yang baik yang sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dan penerima amanah.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan yang dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan umat.

2.6 Tinjauan tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (PSAK 109)

2.6.1 Pengakuan dan Pengukuran

a. Zakat

1) Pengakuan Awal

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlahnya, namun jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Jurnal :

(a) <i>Dr. Kas-Dana Zakat</i>	<i>xxx</i>
<i>Dr. Aset Nonkas (nilai wajar)-Dana Zakat</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr. Dana Zakat</i>	<i>xxx</i>

Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Non amil.

Jurnal :

(b) <i>Dr.Dana– Zakat</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr.Dana Zakat Amil</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr.Dana Zakat – Nonamil</i>	<i>xxx</i>

Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil, maka asset zakat yang diterimaseluruhnya diakui sebagai Dana Zakat–Nonamil. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee*, maka diakui sebagai penambah DanaAmil.

Jurnal :

(c) <i>Dr.Kas-Dana Zakat</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr.Dana zakat – Nonamil</i>	<i>xxx</i>

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai :

(a). Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil zakat

<i>Dr. Dana Zakat nonaamil</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr.Aset nonkas</i>	<i>xxx</i>

(b). Kerugian dan pengurang dana zakat, jika disebabkan oleh kelalaian amil zakat

<i>Dr.Dana – Amil – Kerugian</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr.Aset Nonkas</i>	<i>xxx</i>

3) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang zakat sebesar :

(a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas

<i>Dr. Dana Zakat – Nonamil</i>	<i>xxx</i>
<i>Kr.Kas Dana – Zakat</i>	<i>xxx</i>

(b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset nonkas

Dr. Dana Zakat – Nonamil xxx

Kr. Aset Nonkas – Dana Zakat xxx

b. Infaqdan Sedekah

1) Pengakuan Awal

Penerimaan infak/sedekah diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana infak, shodaqoh. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima. Jika diterima dalam bentuk nonkas, maka diakui sebesar nilai wajar aset. Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan PSAK yang relevan.

Jurnal :

(a).	<i>Dr. Kas – Dana Infak/sedekah</i>	xxx
	<i>Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) – lancar – Dana Infak</i>	xxx
	<i>Dr. Aset Nonkas (nilai wajar) – Tidak Lancar – Dana Infak</i>	xxx
	<i>Kr. Dana Infak/sedekah</i>	xxx

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian Non amil, dalam hal ini penerima infak/sedekah.

Jurnal :

(b)	<i>Dr. Dana – Infak/Sedekah</i>	xxx
	<i>Kr. Dana Infak/sedekah – Amil</i>	xxx
	<i>Kr. Dana Infak/sedekah – Nonamil</i>	xxx

2) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Penerimaan infak dapat berupa kas dan aset non kas dapat dikelompokkan dalam aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang harus segera disalurkan, dan dapat berupa barang sekali pakai atau barang yang memiliki manfaat jangka panjang. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola, dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Aset non kas lancar dinilai sebesar harga perolehan dan aset non kas-tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar.

Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

(a) *Dr.DanaInfak/sedekah –Nonamil* xxx
Kr.Akumulasi PenyusutanAset Nonlancar xxx

Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai :

(b) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil

Dr.DanaInfak/sedekah –Nonamil xxx
Kr.AsetNonkas– DanaInfak/sedekah xxx

(c) Kerugian dan pengurang dana infak/sedekah, jika disebabkan oleh kelalaian amil

Dr.DanaInfak/sedekah –Kerugian xxx
Kr.AsetNonkas– DanaInfak/sedekah xxx

Sebelum disalurkan, dana infak/sedekah dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

(d) *Dr. Kas/Piutang – Infak/sedekah* xxx
Kr.DanaInfak/sedekah xxx

3) Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

(a) Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas

Dr.DanaInfak/sedekah –Nonamil xxx
Kr.Kas–DanaInfak/sedekah xxx

(b) Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk asset nonkas

Dr.DanaInfak/sedekah –Nonamil xxx
Kr.AsetNonkas– DanaInfak/sedekah xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak. sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali asset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Jurnal:

(c) *Dr.DanaInfak/sedekah –Nonamil* xxx

Kr.Kas–DanaInfak/sedekah

xxx

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Jurnal:

(d) *Dr.Piutang- DanaInfak/sedekah*

xxx

Kr.Kas–DanaInfak/sedekah

xxx

c. Dana Nonhalal

Penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau tidak diinginkan oleh entitas syariah karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil dan disalurkan sesuai dengan syariah, diberikan yang dilakukan dengan mengutamakan kesejahteraan umat.

2.6.2 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

2.6.3 Pengungkapan a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan non amil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban

pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik.

5. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a. Sifat hubungan istimewa
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c. Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode

b. Infak/sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada :

1. Kebijakan pembagian antara dana amil dan non amil atas penerimaan infak/sedekah , seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
2. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
3. Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
4. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
5. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di atas diungkapkan secara terpisah.
6. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
7. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
8. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi:
 - a. Sifat hubungan istimewa
 - b. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan

- c. Persentase dari asset yang disalurkan tersebut total penyaluran selama periode.

Selain itu, amil juga mengungkapkan hal berikut :

- a. Keberadaan dana non halal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan serta penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
- b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran zakat dan infak/sedekah.

2.6.4 Laporan Keuangan OPZ

2.6.4.1 Laporan Posisi Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

NERACA (Laporan Posisi Keuangan)

BAZ “XXX”

PER 31 DESEMBER 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
Aset Lancar:		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	XXX	Biaya yang masih harus dibayar	XXX
Instrumen Keuangan	XXX	Kewajiban Jangka Panjang	
Piutang	XXX	Imbalan Kerja Jangka Panjang	XXX
Aset tidak Lancar		Jumlah Kewajiban	XXX
Aset Tetap	XXX	Saldo Dana	XXX
Akumulasi Penyusutan	XXX	Dana Zakat	XXX
		Dana Infaq/Shodaqoh	XXX
		Dana Amil	XXX
		Dana Nonhalal	XXX
		Jumlah Dana	XXX
		Jumlah Dana	
Jumlah Aset	XXX	Jumlah Kewajiban Saldo Dana	XXX

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari Muzaki	
Muzaki Entitas	XXX
Muzaki Individual	XXX
Hasil Penempatan	<u>XXX</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat	XXX
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat	<u>XXX</u>
Jumlah Penerimaan Dana Zakat setelah Bagian Amil	XXX
Penyaluran	(XXX)
Fakir-Miskin	(XXX)
Riqab	(XXX)
Gharim	(XXX)
Muallaf	(XXX)
Sabilillah	<u>(XXX)</u>
Ibnu Sabil	(XXX)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	(XXX)
Surplus (Defisit)	(XXX)
Saldo Awal	
Saldo Akhir	
DANA INFAQ/SHADAQAH	
Penerimaan	
Infaq/Shadaqah terikat	XXX
Infaq/Shadaqah tidak terikat	XXX
Bagian Amil atas Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	XXX
Hasil Pengelolaan	<u>XXX</u>

Jumlah Penerimaan Dana Infaq/Shadaqah	XXX
Penyaluran	
Infaq/Shadaqah terikat	(XXX)
Infaq/Shadaqah tidak terikat	(XXX)
Alokasi Pemanfaatan Aset Kelolaan(misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	<u>(XXX)</u> (XXX)
Jumlah Penyaluran dana Infaq/Shadaqah	(XXX)
Surplus (defisit)	(XXX)
Saldo Awal	
Sado Akhir	
DANA AMIL	
Penerimaan	XXX
Bagian Amil dari Dana Zakat	XXX
Bagian Amil dari Dana Infaq/Shadaqah	XXX
Penerimaan Lainnya	<u>XXX</u>
Jumlah Penerimaan Dana Amil	
PENGUNAAN	(XXX)
Beban Pegawai	(XXX)
Beban Penyusutan	(XXX)
Beban Umum dan Administrasi lainnya	<u>(XXX)</u>
Jumlah Penggunaan Dana Amil	(XXX)
Surplus (defisit)	XXX
Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga Bank	XXX
Jasa Giro	XXX
Penerimaan nonhalal	XXX
Jumlah Penerimaan Dana nonhalal	XXX
Peggunaan	(XXX)
Jumlah Penggunaan Dana nonhalal	XXX
Surplus (defisit)	XXX

Saldo Awal	XXX
Saldo Akhir	XXX
Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shadaqah, dan amil dan dan nonhalal	XXX

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

BAZ "XXX"

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infaq/shadaqah-aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	XXX	XXX	(XXX)	XXX	-	XXX
Dana infaq/shadaqah asset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	XXX	XXX	(XXX)	XXX	(XXX)	XXX

4. Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

2.7 Kepercayaan

2.7.1 Definisi Kepercayaan

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka.

Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman. (M.Taufiq Amir, Raja Garfindo 2005)

Kepercayaan pada dasarnya adalah kemauan suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Kepercayaan juga merupakan sekumpulan keyakinan spesifik terhadap *Integritas* (kejujuran pihak yang dipercaya), *Benevolence* (perhatian dan motivasi yang dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan yang mempercayai mereka), *Competency* (kemampuan pihak yang dipercaya untuk melaksanakan kebutuhan yang mempercayai) dan *Predictability* (konsistensi perilaku pihak yang dipercaya).(Wahab Zaenuri dkk, 2013)

Kepercayaan merupakan penilaian atas kredibilitas pihak yang akan dipercaya atas kemampuan pihak yang dipercaya dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kepuasan adalah suatu ungkapan yang bernada positif yang berasal dari penilaian semua aspek hubungan kerjasama antara pihak satu dengan pihak lain. Kepuasan tersebut berdasarkan sejauhmana manfaat sebuah produk/jasa yang dirasakan sesuai dengan yang diharapkan

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil satu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang – orang yang lebih dapat ia percaya daripada yang kurang dipercayai (Moorman, 1993).

Menurut Rousseau *et al* (1998), kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. Kepercayaan konsumen didefinisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan

tindakan pihak yang dipercaya (Mayer et al, 1995).

Menurut Ba dan Pavlou (2002) mendefinisikan kepercayaan sebagai penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang melakukan transaksi tertentu sesuai dengan harapan dalam sebuah lingkungan yang penuh ketidakpastian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepercayaan muzakki adalah kesediaan satu pihak menerima resiko dari pihak lain berdasarkan keyakinan dan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan sesuai yang diharapkan, meskipun kedua belah pihak belum mengenal satu sama lain.

2.7.2 Faktor Pendukung Kepercayaan

Model kepercayaan organisasional memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya (*propensity to trust*). Kecenderungan (*propensity*) dapat dianggap sebagai keinginan umum untuk mempercayai orang lain. Kecenderungan akan mempengaruhi seberapa banyak kepercayaan yang dimiliki seseorang untuk orang yang dipercaya. Kepercayaan melibatkan loncatan kognitif melampaui harapan-harapan yang dijamin oleh dasar pemikiran dan pengalaman. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh *core values*, yaitu sebagai berikut: (Wibowo, Grafindo Persada 2006)

1. Keterbukaan

Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.

2. Kompeten

Adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.

3. Kejujuran

Kejujuran merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang

bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

4. Integritas

Integritas adalah keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

2.8 Loyalitas

2.8.1 Definisi Loyalitas

Menurut kamus umum bahasa Indonesia Loyalitas berarti taat, patuh, dan setia. Sedangkan Loyalitas menurut Oliver adalah komitmen yang dipegang kuat untuk membeli lagi atau berlangganan lagi produk atau jasa tertentu dimasa depan meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. (Poerwadarminta, Jakarta: Balai Pustaka 2004)

Secara umum loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian dan kepercayaan yang ditujukan kepada seseorang atau lembaga, yang didalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perilaku terbaik (Rasimin, 1998).

Loyalitas secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas produk, baik barang maupun jasa tertentu yang merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. (Theresia dan filisia, Jurnal manajemen kewirausahaan 2011)

2.8.2 Faktor Pendukung Loyalitas

Adapun bagi organisasi nirlaba seperti lembaga amil zakat maka tugas utama untuk lembaga tersebut ialah mencari *muzakki* yaitu para *muzakki* (wajib zakat), *munfiq* (orang yang berinfaq) *mushadiq* (orang yang bersedekah). Semakin banyaknya lembaga amil zakat yang bermunculan menyebabkan tingkat loyalitas dan segmentasi *muzakki* menjadi hal penting untuk dikaji. Ini diperlukan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* untuk tetap loyal terhadap lembaga amil zakat. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Kualitas Pelayanan

Secara ringkas, kelima dimensi kualitas jasa dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut:

- a. *Tangible*, yang berupa fasilitas, peralatan dan penampilan fisik
- b. *Reliability*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menepati janji dan dapat diandalkan.
- c. *Responsivness*, yaitu keinginan perusahaan untuk membantu pelanggan dan menyajikan jasa yang tepat
- d. *Assurance*, yaitu pengetahuan dan keramah-tamahan personel dan kemampuan mereka menciptakan opini untuk dapat dipercaya oleh pelanggan
- e. *Empathy*, yaitu kepedulian dan perhatian perusahaan kepada pelanggan.

Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) kualitas pelayanan menjadi pertimbangan para *muzakki* untuk menyalurkan dana mereka pada suatu BAZ. Kemudahan dalam menyalurkan dana merupakan hal penting bagi para *muzakki*. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada donator maka semakin baik tanggapan para *muzakki* untuk menyalurkan dan mereka ke lembaga zakat.

2. Faktor Produk

Sebagian perusahaan memberikan nilai unggul melalui kemudahan dan harga rendah yang lain dengan memanjakan pelanggannya dan membuat produk untuk memenuhi kebutuhan khusus yang secara tepat dibutuhkan oleh relung pasar. Hasilnya ialah kesetiaan (keloyalatan) dan preferensi pelanggan yang kuat. Bagi lembaga amil zakat produk yang diciptakan untuk kepuasan *muzakki* yaitu

program – program pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Program yang dibentuk oleh BAZ yang tepat sasaran menjadi pertimbangan para *muzakki* menyalurkan dana mereka pada Badan Amil Zakat (BAZ). *Muzakki* yang lebih rasional dalam preferensi berdonasi akan memperhatikan keinginan dan ketertarikan mereka terhadap program-program yang ditawarkan dan yang telah dijalankan oleh lembaga amil zakat.

3. Faktor Kepercayaan

Dimensi kepercayaan terhadap suatu produk, karyawan, atau penyedia jasa adalah:

- a. Kredibilitas, berhubungan dengan kepercayaan kepada penyedia jasa.
- b. Kompetensi, artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyedia jasa untuk melakukan pelayanan yang diharapkan
- c. *Courtesy*, yaitu yang meliputi sikap atau moral para penyedia jasa terhadap pemakai. (Erlina Afyati, 2011)

4. Faktor Nilai Religius

Berkaitan dengan zakat, Eri Sudewo menambahkan satu faktor yang juga mempengaruhi kelayakitan *muzakki*. Dalam pengelolaan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) aspek religius sangat menentukan kelayakitan dari para *muzakki*. Indikator dari faktor religius adalah prinsip-prinsip dari lembaga amil zakat. Para amil dituntut memiliki beberapa persyaratan moralitas seperti:

- a. Amanah, dana ZIS merupakan amanah dari ummat yang akan dititipi untuk para *mustahiq*.
- b. *Sidiq*, semua tindakan yang dilakukan oleh amil harus benar. Baik itu dalam menghimpun, mendistribusikan dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) maupun dalam melayani para *muzakki*.
- c. Bertanggung jawab, merupakan sifat yang harus dimiliki oleh amil untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap dana ZIS yang diamanahi oleh *muzakki*.
- d. Adil, adil dalam pengertian amil bisa memberikan akses info bantuan untuk seluruh *mustahiq*

- e. Kasih, sifat kasih menjadi tuntunan untuk memberikan rasa kasih terhadap para *mustahiq* sehingga bagi para *mustahiq* memberikan ketenangan bathin.
- f. Gemar menolong, merupakan nilai Islam yang mencontohkan para *muzakki* menyalurkan dananya ke amil untuk didistribusikan kepada kaum dhuafa
- g. Tabah, yakni kuat terhadap problem kaum miskin yang beragam. Bersabar dalam menangani berbagai persoalan kaum dhuafa.

2.9 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam penelitian ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan antara lain:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zainal A Wijaya (2011)	<i>Good Governance</i> Badan Amil Zakat, Infak , dan Sedekah Dan Dampaknya Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzaki	1. Variabel dependen: Badan Amil Zakat, Infak , dan Sedekah, Keputusan dan Loyalitas Muzaki 2. Variabel independen: <i>Good Governance</i> : Akuntabilitas, Transparansi dan Manfaat	1. Transparansi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. 2. Akuntabilitas organisasi berpengaruh

			3. Model: regresi berganda	signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah 3. Kemanfaatan BAZIS berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah 4. Transparansi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada
--	--	--	----------------------------------	--

				<p>BAZIS Jawa Tengah</p> <p>5. Akuntabilitas Organisasi BAZIS berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) pada BAZIS Jawa Tengah</p> <p>6. Manfaat BAZIS berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah</p> <p>7. Kepuasan Muzaki berpengaruh signifikan terhadap</p>
--	--	--	--	---

				Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah
2	Rizki (2013)	Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen: Akuntabilitas dan Transparansi 2. Variabel dependen: kualitas lembaga amil zakat 3. Model: regresi linier berganda 	akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh terhadap kualitas Lembaga Amil Zakat dapat diterima karena akuntabilitas dan transparansi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Lembaga Pengelola Zakat
3	Hana Septi Kuncaraningsih (2014)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Kepuasan Muzakki pada Badan Amil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel Independen <i>Good Corporate Governance</i>: Kewajaran, Transparansi, akuntabilitas, 	<i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan muzaki pada BAZNAS Kabupaten Sleman

		Zakat (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta	Responibilitas 2. Variabel dependen: Kepuasan Muzakki 3. Model: Koefisien determinasi dan regresi linier	
4	Abdul Kholik Syafa'at	Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Banyuwangi	1. Variable Independen: Zakat, Infaq, Shodaqoh 2. Variabel Dependen: Badan Amil Zakat`	

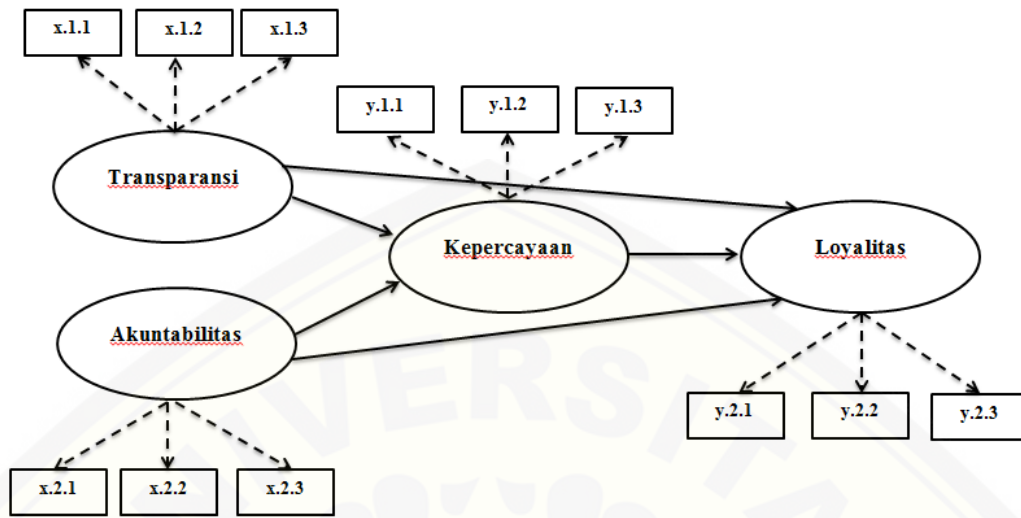
Penelitian ini menggunakan persepsi muzakki dan amil zakat untuk melihat pengaruh akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat.

2.10 Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan telaah dan kajian atas berbagai referensi teoritik dan empirik dapat dirumuskan kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam riset empiris ini, seperti gambar 2.2. Gambar 2.2 menunjukkan variable laten yang akan diteliti yaitu ada empat variabel dan masing-masing variable diambil dari tiga indikator. Nama-nama variabel dan indikator dijelaskan setelah gambar konseptual sebagai berikut.

Gambar 2.2

Kerangka Model Penelitian



Keterangan :



Gambar 1

Kerangka Konseptual

Adapun susunan atau keterangan variabel dan indikator dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 2.3

Variabel, Indikator dan Alat Ukur

no	Variabel	Indikator	Alat Ukur
1	Transparansi	a. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab b. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar c. Kemudahan akses informasi	Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : - annual reports - brosur - pusat informasi

		d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - telepon bebas pulsa - liputan media - iklanlayananmasyarakat - website - papan pengumuman - Koran lokal
2.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran b. Akuntabilitas Proses c. Pelaksanaan Akuntabilitas d. Akuntabilitas Program e. Akuntabilitas Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku - Menggunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan - Apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien - Penetapan dan pencapaian tujuan telah ditetapkan - Pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak
3.	Kepercayaan muzaki (menunaikan ZIS kepada LAZ)	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbukaan b. Kompeten c. Kejujuran d. Integritas 	<ul style="list-style-type: none"> - kuisioner

4.	Loyalitas muzakki (menunaikan zakat kepada LAZ)	a. faktor kualitas pelayanan b. faktor produk/program c. faktor kepercayaan d. faktor nilai religius	- Kuisisioner
----	---	---	---------------

2.11 Perumusan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan muzakki

Transparansi merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK SAP, 2005).

Faktor utama yang akan di uji adalah transparansi dan kepercayaan muzakki. Transparansi Badan amil zakat merupakan suatu usaha badan amil zakat untuk meyakinkan para muzakki bahwasanya Badan amil zakat (amil) tersebut benar-benar transparan dalam memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yakni masyarakat calon muzakki dan muzakki itu sendiri. Dengan adanya penerapan transparansi yang dilakukan oleh badan amil zakat, diharapkan muzakki percaya terhadap badan amil zakat tersebut.

Tapanjeh (2009 :563) mengemukakan bahwa konsep transparansi dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman. (M. Taufiq Amir, Raja Garfindo 2005)

Hasil penelitian Rizky (2012) dan Zainal (2011) menyatakan bahwa transparansi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan muzaki dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah

2.11.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepercayaan muzakki

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991).

Faktor kedua yang akan di uji adalah pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki. Akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peransosial dimana *Muhtasib* (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai (Tapanjeh, 2009:257).

Kepercayaan. Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini

muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman.(M.Taufiq Amir, Raja Garfindo 2005)

Triwuyono dalam Kholmi (2012 :7) berpendapat teori yang paling tepat adalah *syariah enterprise theory* yaitu konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan *principle* tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggungjawaban terhadap manusia yang lain sebesar pertanggungjawabannya terhadap alam atau lingkungan. Namun, akhir dan tujuan utama dari kedua pertanggungjawaban tersebut adalah Allah.

Hasil penelitian Rizky (2012) dan Zainal (2011) menyatakan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan dan loyalitas muzakki dalam menyalurkan zakat. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah

2.11.3 Pengaruh Transparansi terhadap Loyalitas muzakki

Transparansi merupakan ketersediaan informasi yang bersifat terbuka jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK SAP, 2005).

Faktor ketiga yang akan diuji adalah pengaruh transparansi terhadap loyalitas. Transparansi Badan amil zakat merupakan suatu usaha badan amil zakat untuk meyakinkan para muzakki bahwasanya Badan amil zakat (amil) tersebut benar-benar transparan dalam memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi yakni masyarakat calon muzakki dan muzakki itu sendiri. Dengan adanya penerapan transparansi yang dilakukan oleh badan amil zakat, diharapkan muzakki percaya terhadap badan amil zakat tersebut.

Tapanjeh (2009 :563) mengemukakan bahwa konsep transparansi dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Loyalitas secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas produk, baik barang maupun jasa tertentu yang merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. (Theresia dan filisia, Jurnal manajemen kewirausahaan 2011).

Loyalitas dalam hal ini kesetiaan muzakki terhadap lembaga amil zakat. Dimana muzakki percaya penuh terhadap lembaga amil zakat terhadap dana yang diberikan. Muzakki yakin dana zakat yang diberikan kepada amil benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak menerima zakat. Transparansi informasi tersebut sangat diperlukan bagi pihak pengelola zakat maupun bagi si pemberi zakat (muzakki).

Faktor kualitas layanan yang diberikan pengelola zakat (amil) terhadap pemberi dana zakat (muzakki) berupa transparansi secara ringkas, kelima dimensi kualitas jasa dan ukuran-ukurannya adalah sebagai berikut:

- a. *Tangible*, yang berupa fasilitas, peralatan dan penampilan fisik
- b. *Reliability*, yaitu kemampuan perusahaan dalam menepati janji dan dapat diandalkan.
- c. *Responsivness*, yaitu keinginan perusahaan untuk membantu pelanggan dan menyajikan jasa yang tepat
- d. *Assurance*, yaitu pengetahuan dan keramah-tamahan personel dan kemampuan mereka menciptakan opini untuk dapat dipercaya oleh pelanggan

e. *Empathy*, yaitu kepedulian dan perhatian perusahaan kepada pelanggan.

Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) kualitas pelayanan menjadi pertimbangan para *muzakki* untuk menyalurkan dana mereka pada suatu BAZ. Kemudahan dalam menyalurkan dana merupakan hal penting bagi para *muzakki*. Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada donatur maka semakin baik tanggapan para *muzakki* untuk menyalurkan dana mereka ke lembaga zakat.

Secara lebih spesifik, penelitian yang terkait dengan pengaruh transparansi terhadap loyalitas muzakki yang pernah dilakukan oleh Zainal A Wijaya (2011) yang menyatakan Transparansi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Transparansi berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah

2.11.4 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Loyalitas muzakki

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu *accountability*, yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban (Salim, 1991).

Faktor keempat yang akan diuji adalah pengaruh akuntabilitas terhadap loyalitas. Akuntabilitas dalam hal ini pertanggungjawaban lembaga amil zakat terhadap dana yang diberikan muzakki kepada lembaga amil zakat tersebut. Amil bertanggung jawab kepada muzakki terhadap dana yang diberikan, apakah dana zakat tersebut benar-benar tersalurkan atau sampai kepada orang yang berhak menerima zakat. Pertanggungjawaban yang diberikan amil yang kepada muzakki, calon muzakki atau masyarakat salah satunya berupa publikasi laporan keuangan dalam media cetak maupun elektronik. Sehingga diharapkan muzakki yang sudah menyalurkan dana zakatnya percaya dan yakin, bahwa lembaga amil tersebut benar-benar akuntabel. Sehingga muzakki setiap akan menyalurkan dana zakatnya tidak akan mencari atau berpindah ke lembaga amil zakat yang lain. Dari loyalitas ini bisa terlihat dari kualitas lembaga amil

zakat tersebut.

Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Loyalitas secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas produk, baik barang maupun jasa tertentu yang merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. (Theresia dan filisia, Jurnal manajemen kewirausahaan 2011).

TriwuyonodalamKholmi (2012 :7) berpendapat teori yang paling tepat adalah *syariah enterprise theory* yaitu konsep akuntabilitas diturunkan dari trilogi dimensi akuntabilitas yaitu Allah sebagai pemberi amanah dan *principle* tertinggi, manusia, dan alam. Trilogi ini menunjukkan bahwa manusia memiliki pertanggung jawaban terhadap manusia yang lain sebesar pertanggung jawabannya terhadap alam atau lingkungan. Namun, akhir dan tujuan utama dari kedua pertanggung jawaban tersebut adalah Allah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumaizi, STIMART, AMNI Zainal A Wijaya Fakultas Ekonomi UNISSULA (2011) Akuntabilitas Organisasi BAZIS berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) pada BAZIS Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah

2.11.5 Kepercayaan dan Loyalitas

Kepercayaan dalam hal ini yaitu muzakki percaya dan yakin terhadap amil zakat. Muzakki percaya penuh bahwa lembaga amil zakat tersebut amanah dalam menyalurkan dana zakatnya. Muzakki yakin dan tersebut diberikan atau dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Dengan adanya

rasa percaya yang diberikan muzakki kepada lembaga amil zakat diharapkan muzakki bersikap loyal kepada lembaga amil zakat tersebut. Muzakki tetap setia menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga amil zakat tersebut dengan bukti data muzakki dalam menyalurkan dana zakatnya masuk dalam daftar data donator zakat dari tahun ke tahun data atau identitas tersebut ada.

Kepercayaan. Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman. (M. Taufiq Amir, Raja Garfindo 2005).

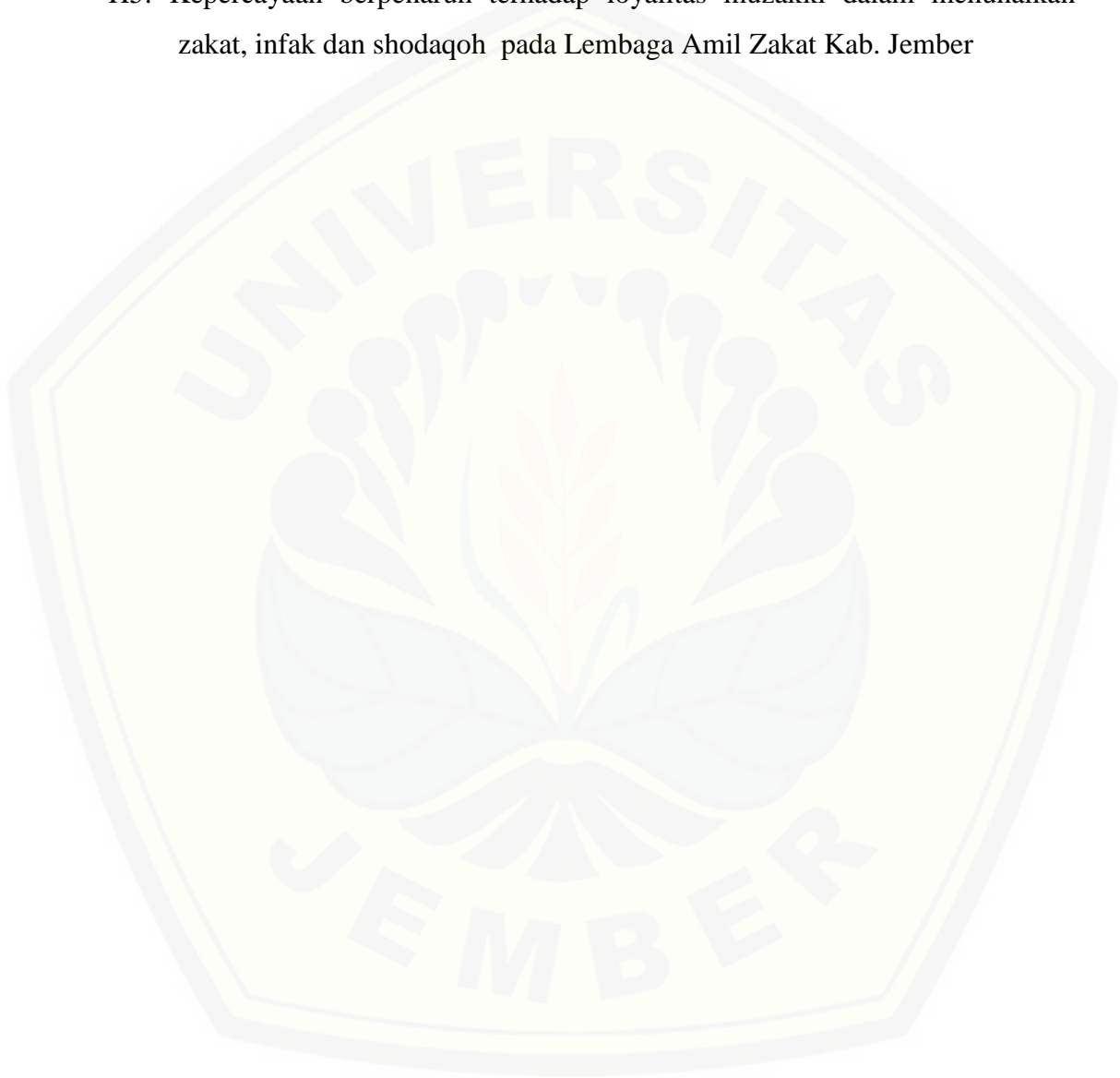
Loyalitas secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas produk, baik barang maupun jasa tertentu yang merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. (Theresia dan filisia, Jurnal manajemen kewirausahaan 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumaizi, STIMART, AMNI Zainal A Wijaya Fakultas Ekonomi UNISSULA (2011). Kepuasan Muzaki berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa Tengah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H5: Kepercayaan berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah

Oleh karena itu, dalam penelitian hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

- H1: Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah pada Lembaga Amil Zakat Kab. Jember
- H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Kab. Jember

- H3: Transparansi berpengaruh terhadap loyalitas muzaki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaoh pada Lembaga Amil Zakat Kab. Jember
- H4: Akuntabilitas berpengaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Kab. Jember
- H5: Kepercayaan berpenaruh terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infak dan shodaqoh pada Lembaga Amil Zakat Kab. Jember



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subyek. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber penelitian (responden) dan diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) yang diberikan, yaitu lisan (verbal), tertulis (kuesioner), dan ekspresi (observasi). Sedangkan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. (Indriantoro dan Supomo, 2009). Sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei dan metode data eksternal. Metode survei, merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2009). Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Sedangkan metode data sekunder eksternal yakni berupa buku, jurnal, majalah atau buletin antara lain yang memuat data sejarah perusahaan, struktur organisasi, dan program-program kerja dalam perusahaan tersebut.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan adalah kuisisioner, yang merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan tertulis kepada responden (Indriantoro dan Supomo, 2009). Penyebaran kuisisioner dilakukan dengan cara menyebarkan/memberikan daftar pertanyaan kepada responden secara tertulis dengan harapan mereka akan memberikan respon atas pertanyaan tersebut. Setelah responden mengisi daftar pertanyaan tersebut, hasil respon yang diberikan responden tersebut ditabulasi dan diolah.

Skala *Likert* digunakan untuk mengukur indikator masing-masing variabel. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), Skala *Likert* adalah metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju dan ketidak setujuannya terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu. Peneliti memberikan penilaian skor dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kriteria Skor

Keterangan	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Netral	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan individu atau obyek yang memiliki kualitas serta cir-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri-ciri tersebut, populasi dapat diartikan sebagai kumpulan elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan. Populasi pada penelitian ini adalah muzakki LAZISMU Kab. Jember.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relative sama dan dianggap dapat mewakili populasi (Sugiyono, 1999). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian (Kuncoro, 2003). Responden dalam penelitian ini adalah muzakki pada lembaga amil zakat dipilih muzakki yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan relevansi peneliti. Muzakki dalam penelitian ini yaitu muzakki yang sudah menjadi anggota muzakki di lembaga amil zakat minimal selama tiga tahun.

Besarnya sampel (*sample size*), sampel minimum dalam model PLS cukup

dengan menggunakan ukuran sampel yang kecil. Ukuran sample kecil dengan persyaratan minimal adalah 10 kali dari besarnya indikator formatif terbanyak yang digunakan untuk mengukur 1 variabel laten atau 10 kali jumlah jalur struktural terbanyak yang ditujukan ke variabel laten tertentu dalam model struktural. (jonathan dan umi, 2015:13) penelitian yang dilakukan oleh Chin dan Nested (1999) membuktikan hanya dengan menggunakan 20 data mereka dapat menggunakan PLS SEM dengan benar. (Jonathan dan Umi, 2015:14). Dalam penelitian ini indikator formatif yaitu variabel loyalitas dengan 4 indikator berupa faktor kualitas pelayanan, faktor produk atau program, faktor kepercayaan dan faktor religius. Persyaratan minimal untuk ukuran sample PLS yaitu 10×4 indikator variabel formatif. Berarti dalam penelitian ini sample minimum yang digunakan sebesar 40 responden. Secara lebih rinci, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yang menetapkan sample berdasar kankriteria tertentu.

Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah para muzakki yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Telah menjadi anggota muzakki di LAZISMU Kabupaten Jember sekurang-kurangnya selama tiga tahun.

3.4.1 Variabel Independen (Variabel Eksogen)

Variabel eksogen adalah variabel penyebab yang diposisikan tidak terpengaruh oleh variabel sebelumnya atau variabel yang tidak diprediksi oleh variabel lain dalam model (Ferdinand dalam Lestari, 2013). Pada penelitian ini, variabel eksogennya adalah transparansi dan akuntabilitas.

3.4.1.1 Kategori Variabe Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan (Mardiasmo dalam Maryati 2012).

Tapanjeh (2009 :563) mengemukakan bahwa konsep transparansi dalam Islam adalah:

1. Organisasi bersifat terbuka kepada muzakki. Seluruh fakta yang terkait dengan aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

3.4.1.2 Kategori Variabel Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan organisasi yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggungjawab kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Variabel akuntabilitas diukur dengan menggunakan lima instrumen yang diadopsi dari Elwood (1993), yaitu:

1. Akuntabilitas hukum, (*Probability and legality accountability*). Indikator untuk menilai kepatuhan hukum lembaga amil zakat. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).
2. Akuntabilitas Proses (*Process accountability*). Indikator untuk menilai proses atau kegiatan lembaga amil zakat. Dalam hal ini digunakan proses, prosedur atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).
3. Pelaksanaan Akuntabilitas (*Performance accountability*). Indikator untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).
4. Akuntabilitas Program (*Program accountability*). Indikator untuk menilai penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).
5. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*). Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

3.4.2 Variabel Dependen (Variabel Endogen)

Variabel endogen adalah variabel yang diprediksi oleh satu atau beberapa variabel yang lain dalam model atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen baik secara langsung atau tidak langsung (Ferdinand dalam Lestari, 2013). Variabel endogen dalam penelitian ini adalah kepercayaan dan loyalitas.

3.4.2.1 Kategori Variabel Kepercayaan

Kepercayaan (*trust* atau *belief*) merupakan keyakinan bahwa tindakan orang lain atau suatu kelompok konsisten dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan lahir dari suatu proses secara perlahan kemudian terakumulasi menjadi suatu bentuk kepercayaan, dengan kata lain kepercayaan adalah keyakinan kita bahwa di satu produk ada atribut tertentu. Keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang adanya pembelajaran dan pengalaman. (M. Taufiq Amir, Raja Garfindo 2005). Variabel kepercayaan diukur dengan menggunakan empat instrumen yang diadopsi dari Wibowo (2006).

1. Keterbukaan. Kerahasiaan dan kurangnya transparansi dalam menjalankan sesuatu akan mengganggu *trust building*. Oleh karena itu diperlukan keterbukaan antara kedua belah pihak agar keduanya dapat saling percaya antara satu sama lain.
2. Kompeten, kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas atau peran dalam membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran. Yakni sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. Kejujuran, merupakan elemen terpenting dalam mendapatkan sebuah kepercayaan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan yang bersifat merugikan yang lain. Jujur bermakna keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Dengan kata lain jujur adalah berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Dalam penerapannya, secara hukum tingkat kejujuran seseorang biasanya dinilai dari ketepatan pengakuan atau apa yang dibicarakan dengan kebenaran dan kenyataan yang terjadi.

4. Integritas, keselarasan antara niat, pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam prosesnya, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik. Orang yang berintegritas tinggi mempunyai sikap yang tulus, jujur, berperilaku konsisten serta berpegang teguh pada prinsip kebenaran untuk menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

3.4.2.2 Kategori Variabel Loyaitas

Loyalitas secara umum dapat diartikan kesetiaan seseorang atas produk, baik barang maupun jasa tertentu yang merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan konsumen dalam menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan oleh pihak perusahaan, serta untuk tetap menjadi konsumen dari perusahaan tersebut. (Theresia dan filisia, Jurnal manajemen kewirausahaan 2011). Faktor loyalitas diukur dengan menggunakan empat instrumen yang diadopsi dari

1. faktor kualitas pelayanan, indikator untuk menilai kesetiaan muzakki dari kualitas pelayanan yang diberikan.
2. faktor produk, indikator untuk menilai produk yang diberikan atau program-program dari lembaga amil zakat memiliki kualitas yang baik.
3. faktor kepercayaan, indikator untuk menilai kepuasan muzakki.
4. faktor nilai religius, indikator untuk menilai ketaatan terhadap Allah SWT.

3.5 Teknik Penyajian dan Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul (Indriantoro dan Supomo, 2009). Analisis statistik deskriptif terdiri atas statistik deskriptif responden dan statistik deskriptif variabel penelitian.

Analisis statistik responden bertujuan untuk menyajikan demografi responden dengan menggunakan ukuran frekuensi. Frekuensi merupakan salah

satu ukuran dalam statistik deskriptif yang menunjukkan nilai distribusi data penelitian yang dinyatakan dengan persentase (Indriantoro dan Supomo, 2009).

Analisis statistik variabel penelitian menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 2007 yang bertujuan untuk menyajikan nilai minimum, *maximum*, *mean*, *median*, dan standar deviasi variabel eksogen dan variabel endogen (Indriantoro dan Sugiono, 2009).

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varian. Menurut Ghazali (2006), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarian menjadi berbasis varian.

SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* (Ghozali, 2006), karena tidak didasarkan pada banyak asumsi. Misalnya, data harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.

Menurut Ghazali (2006) tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukuran yaitu hubungan antara indikator dengan konstraknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah *residual variance* dari variabel dependen.

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama, adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan indikatornya (*loading*).

Ketiga, berkaitan dengan *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi 3 tahap dan setiap tahap iterasi menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan *weight estimate*, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *innermodel* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (Ghozali, 2006). Penelitian ini menggunakan perangkat lunak SmartPLS Versi 3.2_32bit.

Analisis model PLS dibagi menjadi 2 evaluasi yaitu:

3.5.2.1 Evaluasi *Outer Model* (Model Pengukuran)

Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan *outer model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan konstruk laten lainnya. Analisis ini dapat dilakukan melalui:

1). *Convergent Validity*

Merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya indikator dalam mencerminkan variabel. *Convergent validity* dilihat dari nilai *outer loadings*, jika memiliki nilai *outer* > 0,7 indikator dikatakan memiliki validitas tinggi. (Abdillah, 2015).

2). *Discriminant Validity*

Merupakan pengukuran yang digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya blok indikator dalam mencerminkan variabel. Nilai *discriminant validity* dapat dilihat dari nilai *cross loadings* maupun nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Indikator akan dikatakan valid apabila korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain atau konstruk yang memiliki nilai $AVE > 0,5$ (Ghozali, 2014).

3). *Composite Reliability*

Digunakan untuk melihat konsisten atau tidaknya indikator dalam mewakili variabel. Nilai yang memiliki *composite reliability* > 0,7 mempunyai reliabilitas yang tinggi (Ghozali, 2014).

3.5.2.2 Evaluasi *Inner Model* (Model Struktural)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel laten. Analisis *inner model* dapat dilakukan dengan:

- 1) Analisis jalur (*path analysis*), analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan signifikansi penelitian. Hasil penelitian *path analysis* dilihat dari besarnya koefisien jalur struktural (*path coefficients*) dan nilai *t-values* dengan tingkat signifikan pada 1,96 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dari parameter jalur struktural (Ghozali, 2014).
- 2) *R square* adalah koefisien determinasi yang digunakan untuk melihat kemampuan variabel-variabel eksogen untuk menjelaskan variabel endogen. Perubahan nilai *R square* dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, dimana semakin tinggi nilai *R square* semakin besar kemampuan variabel eksogen dapat menjelaskan variabel endogen (Ghozali, 2014).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memprediksi model penelitian pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan muzakki, pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap loyalitas muzakki, serta pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah anggota muzakki LAZISMU Jember sebanyak 60 responden yang telah menjadi anggota muzakki sekurang-kurangnya selama tiga tahun. Alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Model* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dan menggunakan perangkat Lunak SmartPLS Versi 3.2.3_32bit. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan muzakki dalam menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh di LAZISMU Jember (H1) diterima. Jadi apabila kualitas Transparansi ditingkatkan secara baik pada pengelolaan LAZISMU, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap kepercayaan pembayar zakat (muzakki) pada LAZISMU Jember.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan kepercayaan muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh di LAZISMU Jember (H2) diterima. Jadi apabila akuntabilitas diterapkan atau kualitas akuntabilitas ditingkatkan secara baik pada pengelolaan LAZISMU, maka akan dapat memeberikan dampak yang sangat positif terhadap kepercayaan pembayar zakat (muzakki) pada LAZISMU Jember.
3. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infaq, dan shodaqoh di LAZISMU Jember (H3) diterima. Apabila suatu lembaga dalam hal ini LAZISMU Jember menerapkan prinsip-prinsip transparansi atau kualitas transparansi ditingkatkan secara bail pada

pengelolaan LAZISMU, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap pembayar zakat (muzakki) pada LAZISMU Jember.

4. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh di LAZISMU Jember. Apabila suatu lembaga dalam hal ini LAZISMU Jember menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas secara baik pada pengelolaan LAZISMU, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap pembayar zakat (muzakki) pada LAZISMU Jember.
5. Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh di LAZISMU Jember. Apabila kualitas Kepercayaan yang diberikan muzakki terhadap lembaga benar-benar dijaga/ditingkatkan secara baik pada pengelolaan LAZISMU, maka akan dapat memberikan dampak yang sangat positif terhadap loyalitas pembayar zakat (muzaki) pada LAZISMU Jember.

5.2 Keterbatasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi kendala dan menyulitkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian, antara lain :

1. Dalam melakukan penelitian, peneliti kesulitan mencari data responden yang telah menjadi anggota muzakki sekurang-kurangnya selama tiga tahun. Sehingga peneliti perlu menunggu persetujuan pimpinan LAZISMU Jember dan membutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan data tersebut.
2. Data yang diberikan pihak LAZISMU yang berkaitan dengan responden tidak lengkap, sehingga menyulitkan peneliti mencari alamat responden untuk penyebaran kuisisioner kepada para responden.
3. Peneliti tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap responden karena metode yang diterapkan adalah penyebaran kuisisioner kepada para responden sehingga peneliti tidak mengetahui secara langsung situasi dan kondisi responden secara langsung, serta tidak terlibat langsung dengan aktivitas dalam pengisian kuisisioner.

4. Keterbatasan sample yang ada pada LAZISMU jember, tidak semua data muzakki di isi lengkap sehingga untuk penyebaran kuisisioner kepada responden peneliti hanya menyebarkan kuisisioner kepada muzakki yang memiliki data lengkap, seperti alamat lengkap dan nomor telepon.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian ini kiranya peneliti dapat memberikan saran, diantaranya:

1. Bagi LAZISMU Jember, diharapkan agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan cara memperbaiki laporan keuangan sesuai PSAK 109 dan laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga amil zakat seharusnya wajib diaudit oleh auditor internal maupun eksternal, karena dana yang dikelola oleh lembaga zakat merupakan dana muzakki yang dipercayakan pengelolaannya kepada lembaga zakat. Sehingga para muzakki dan calon muzakki yakin akan keputusan mereka menunaikan dana zakatnya terhadap lembaga ini. Sehingga LAZISMU Jember dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah pembayar zakat (Muzakki) dan LAZISMU jember bisa bersaing dengan lembaga amil zakat lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dalam penyebaran kuisisioner/angket untuk melakukan wawancara kepada responden, sehingga peneliti benar-benar tau kondisi sesungguhnya. Dan diharapkan pula untuk penelitian selanjutnya peneliti mengembangkan atau menambah variabel penelitian, yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas muzakki dalam menunaikan zakat, infak, dan shodaqoh serta objek dalam penelitian selanjutnya diharapkan lebih dari satu objek yang diteliti. Sebagai contoh variabel bebas *Good Governance* yang cakupannya lebih luas atau kualitas pelayanan lembaga amil zakat, dan untuk variabel terikatnya keputusan muzakki dalam menunaikan zakat atau minat muzakki dalam menunaikan zakat dan objeknya tidak hanya satu lembaga amil zakat sebaiknya seluruh lembaga amil zakat yang ada di jember.

3. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Jogiyanto.2015. *Partial Least Square (PLS) Alternatif Struktural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Abu Baker dan Chaider, 2006. *Filantropi dan keadilan sosial*, Jakarta. CSRC dan FF
- Al-Qur'an dan terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2008
- Adiwijaya,dkk, 2008, *Good Governanve BAZIS di Propinsi DKI Jakarta*. Laporan Hasil Penelitian
- Dewan Standart Akuntansi Keuangan. *Exposure Draft PSAK 109. Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, 2008*.
- Ghozali, I., (2006). *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hair, Jr., F. Joseph, R. E. Anderson, R. L. Tatham dan W. C. Black. (1992), *Multivariate Data Analysis with Readings*, Macmillan.
- Harahap, Sofyan Syafri, 2003, *Bunga Rampai Akuntansi Islam*, Jakarta, Pustaka Quantum.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B., (2009), *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPF.
- Intan, Emile, 2015. *Pengaruh Implementasi Syariah Governance Terhadap Loyalitas Nasabah*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Jumaizi. 2011 *Good Governance Badan Amil Zakat, Infak , dan Sedekah Dan Dampaknya Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzaki*. Lampung: UNISSULA

- Nugraha, Eka, 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Lembaga Pengelola Zakat terhadap Kepercayaan Muzakki*. Master Thesis, Lampung: Universitas Lampung
- Ramandhita, 2012. *Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC). Peningkatan Potensi Zakat di Indonesia*
- Rizky, Khaerani, 2013. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*. Skripsi, Semarang: Universitas Hasanuddin
- Rizqi, Muhammad, 2015. *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan, Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia
- Rosjidi, 2001. Rahamannurrasjid, 2008. *Bentuk-bentuk Akuntabilitas*
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Sekaran, Uma, 2007. *Research Methods For Business*. Edisi 4 (Edisi Bahasa Indonesia) Buku 1 dan Buku @. Penerbit Salemba 4
- Tapanjeh, Abdussalam Mohammed Abu. 2009. *Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparatives on Accounting*, volume 20 : 556-557
- Triwuyono, Iwan, 2001 *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat Umar, Husein, 2008. *Desain Penelitian akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wibowo, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 380
- www.lazismu.or.id (Di akses 02 Maret 2016)
- Zaenuri, Wahab, dkk, *Membangun Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Melalui Atribut Produk, Komitmen Agama, Kualitas Jasa dan Kepercayaan Pada Bank Syariah*. Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2002

Lampiran 2. Kuisisioner Penelitian

A1. Kuisisioner untuk anggota muzakki LAZISMU Kab. Jember

KUISISIONER PENELITIAN

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP
KEPERCAYAAN DAN LOYALITAS MUZAKKI DALAM MENUNAIKAN
ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH**

(Studi Empiris pada LAZISMU Kabupaten Jember)

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/I Responden

Di tempat

Hal : Permohonan Pengisian Kuisisioner

Dengan Hormat

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir/skripsi, Peneliti selaku mahasiswa program S1 Akuntansi Universitas Jember. Penelitian yang saya lakukan dengan judul penelitian yang saya lakukan dengan judul “ **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Terhadap Kepercayaan dan Loyalitas Muzakki dalam Menunaikan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Jember**”.

Perkenalkan saya:

Nama : Eka Desy Suryaningsih

Nim : 120810301194

Dengan segala kerendahan hati dan memohon dengan hormat untuk meluangkan waktu berpartisipasi dalam pengisian daftar pertanyaan dengan berdasarkan keadaan yang sebenar-benarnya. Kerahasiaan identitas bapak/ibu tidak akan saya berikan pada pihak-pihak manapun dan data tersebut hanya akan saya

pergunakan untuk penyelesaian penelitian ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i responden mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,

Eka Desy Suryaningsih

NIM. 120810301194



PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden berhak membaca terlebih dahulu semua pertanyaan sebelum melakukan pengisian.

1. Isilah identitas saudara/i dengan benar pada kolom yang telah disediakan.
2. Pilihlah jawaban yang menurut saudara/i dianggap sesuai dengan cara melingkari/mencentang angka tersebut.

Identitas Responden

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin : Pria / Wanita
4. Pendidikan Terakhir :

SMA

D3

S1

S2

S3

5. Pekerjaan

Wiraswasta

Karyawan Swasta

PNS

Petani

Pedagang

Karyawan BUMN

Ibu Rumah Tangga

Lainnya

6. Pendapatan / bulan

- Rp 0 - Rp 2.000.000
- Rp 2.000.000 - 5.000.000
- Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000
- Rp 10.000.000 – Rp. 15.000.000
-

7. Lama menjadi donator/muzakki :

8. Dari siapa bapak/ibu mendapat pembayaran zakat pada LAZISMU di Jember:

- saran rekan kerja
- saran dari staf BAZDA
- Saran dari keluarga
- saran dari
- saran dari ustadz atau guru ngaji
- atas kemauan sendiri

9. Selain dari rekomendasi / saran tersebut di atas Bapak / Ibu memperoleh rekomendasi / saran / informasi lainnya

- Internet
- Televisi
- Radio
- Surat Kabar
- majalah

10. Fasilitas yang disediakan oleh LAZISMU Kab. Jember

- Layanan tempat zakat
- Fasilitas pembayaran online
- Lainnya

Keterangan

- 1. STSS = Sangat Tidak Setuju
- 2. TS = Tidak Setuju
- 3. N = Netral
- 4. S = Setuju
- 5. SS = Sangat Setuju

DAFTAR PERTANYAAN

1. Transparansi Informasi LAZISMU Kab. Jember

TR1

1. LAZISMU Kab.Jember menyampaikan informasi keuangan yang berhubungan dengan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh secara terbuka kepada masyarakat luas, terutama kepada pembayar zakat (*muzakki*).

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

TR2

2. LAZISMU Kab.Jember menyediakan sarana informasi pengaduan untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap lembaga tersebut.

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

TR3

3. LAZISMU Kab. Jember memberikan sarana kemudahan akses informasi bagi masyarakat luas dan muzakki

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

TRI4

4. LAZISMU Kab. Jember berusaha meningkatkan sarana informasi dengan melakukan kerjasama dengan media masa

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

2. Akuntabilitas LAZISMU Kab. Jember

AK1

1. LAZISMU Kab. Jember dalam melaksanakan proses kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana sesuai prosedur yang berlaku dan diketahui oleh muzakki

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

AK2

2. LAZISMU Jember mengungkapkan informasi keuangan secara periodik

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

AK3

3. LAZISMU Kab. Jember mempublikasikan informasi mengenai keuangan dan kegiatan yang berhubungan dengan dana yang di salurkan oleh muzakki melalui media masa

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

AK4

4. Laporan pertanggungjawaban organisasi mudah dipahami, diakses dan bersifat terbuka bagi pihak-pihak yang memerlukan

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

AK5

5. Laporan pertanggungjawaban organisasi telah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas, muzakki/publik

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

3. Kepercayaan Muzakki LAZISMU Kab. Jember

K1

1. Laporan keuangan yang dipublikasikan setiap periode tertentu sehingga lembaga ini sangat bersifat transparan

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

K2

2. Mampu memecahkan permasalahan ekonomi khususnya masyarakat dibawah

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

K3

3. Dana yang disalurkan oleh LAZISMU benar-benar tersalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

4. Loyalitas Muzakki LAZISMU Kab. Jember

L1

1. Pelayanan yang diberikan LAZISMU sesuai dengan harapan muzakki

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

L2

2. Pengelolaan yang dilakukan LAZISMU sangat baik

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

L3

3. Cara menyalurkan zakat kepada LAZISMU bisa dilakukan secara langsung atau transfer

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

L4

4. Senang atas pengelolaan LAZISMU

Sangat Tidak Setuju (STS) (1)	Tidak Setuju (TS) (2)	Netral (N) (3)	Setuju (S) (4)	Sangat Setuju (SS) (5)
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	------------------------------

Lampiran 3. Jawaban Respondan Variabel Transparansi (TR)

No Responden	TR1	TR2	TR3	TR4	X1
1	5	5	4	4	18
2	5	5	5	5	20
3	2	2	2	2	8
4	4	5	5	4	18
5	5	5	5	4	19
6	4	5	4	5	18
7	4	4	4	3	15
8	5	5	5	4	19
9	5	5	5	4	19
10	5	5	5	4	19
11	4	5	4	5	18
12	5	5	5	4	19
13	5	4	4	3	16
14	4	4	4	3	15
15	4	5	4	3	16
16	4	4	3	2	13
17	5	5	5	4	19
18	2	2	3	2	9
19	5	5	5	4	19
20	4	5	5	5	19
21	4	5	5	3	17
22	4	4	3	2	13
23	4	4	3	2	13
24	5	5	5	5	20
25	3	3	3	2	11
26	5	5	5	5	20
27	4	4	3	3	14
28	5	5	5	4	19
29	5	5	5	5	20
30	5	5	5	3	18

31	5	4	4	3	16
32	4	5	5	3	17
33	3	3	3	2	11
34	4	4	3	3	14
35	5	5	5	5	20
36	5	5	5	5	20
37	4	5	5	3	17
38	5	5	5	4	19
39	4	4	3	2	13
40	4	4	4	3	15
41	5	5	5	4	19
42	4	4	3	3	14
43	4	4	4	3	15
44	5	5	4	5	19
45	4	4	4	3	15
46	4	5	5	4	18
47	5	5	4	3	17
48	5	5	5	5	20
49	4	4	4	3	15
50	4	3	4	2	13
51	3	3	4	2	12
52	2	2	2	2	8
53	3	3	3	2	11
54	4	5	4	3	16
55	4	3	3	3	13
56	3	3	5	2	13
57	5	5	4	3	17
58	4	5	5	3	17
59	4	5	5	3	17
60	4	4	4	4	16

Lampiran 4. Jawaban Respondan Variabel Akuntabilitas (AK)

No Responden	AK1	AK2	AK3	AK4	AK5	AK
1	5	4	5	5	5	24
2	4	4	4	4	5	21
3	4	4	3	3	2	16
4	4	3	4	4	4	19
5	4	3	4	4	4	19
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	3	3	3	15
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	4	5	5	24
10	5	5	5	4	5	24
11	4	3	4	3	4	18
12	4	4	4	4	4	20
13	4	5	3	3	4	19
14	4	3	4	4	4	19
15	4	4	4	3	4	19
16	4	4	4	3	4	19
17	4	4	4	4	5	21
18	3	3	3	3	3	15
19	5	5	3	5	5	23
20	3	4	3	3	3	16
21	5	4	5	5	5	24
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	5	21
24	5	5	5	5	5	25
25	4	5	4	4	4	21
26	5	4	5	4	5	23
27	4	4	4	3	4	19
28	4	4	4	3	4	19
29	5	5	5	4	5	24
30	5	4	5	5	5	24

31	5	5	5	4	5	24
32	3	3	3	3	3	15
33	5	5	5	4	5	24
34	4	4	3	3	4	18
35	3	3	3	3	3	15
36	3	4	3	3	3	16
37	4	4	3	4	4	19
38	4	3	3	3	4	17
39	5	5	5	3	5	23
40	5	5	5	3	5	23
41	5	4	5	5	5	24
42	4	4	3	3	4	18
43	5	4	5	5	5	24
44	4	4	3	3	4	18
45	5	5	5	5	5	25
46	4	4	3	3	4	18
47	5	5	5	5	5	25
48	4	4	3	3	3	17
49	4	3	3	3	3	16
50	4	4	3	4	3	18
51	3	3	3	3	3	15
52	3	3	3	3	3	15
53	4	4	3	3	3	17
54	4	4	3	3	4	18
55	4	4	3	3	3	17
56	4	5	3	3	3	18
57	5	5	4	5	5	24
58	5	5	5	4	5	24
59	5	4	5	5	5	24
60	4	4	4	4	4	20

Lampiran 5. Jawaban Responden Variabel Kepercayaan (KP)

No Responden	KP1	KP2	KP3	Y1
1	5	5	5	15
2	4	5	5	14
3	3	2	2	7
4	4	4	3	11
5	4	5	3	12
6	4	5	5	14
7	3	1	2	6
8	5	4	4	13
9	4	5	5	14
10	5	4	4	13
11	4	5	5	14
12	4	5	5	14
13	3	5	5	13
14	4	5	3	12
15	4	5	4	13
16	4	4	3	11
17	4	4	4	12
18	3	2	2	7
19	3	4	4	11
20	3	5	3	11
21	5	4	4	13
22	4	5	5	14
23	4	4	4	12
24	5	4	5	14
25	4	5	5	14
26	5	4	5	14
27	4	4	4	12
28	4	5	5	14
29	5	5	5	15
30	5	5	5	15

31	5	4	4	13
32	3	1	2	6
33	5	4	4	13
34	3	5	4	12
35	3	4	3	10
36	3	4	3	10
37	3	4	4	11
38	3	5	3	11
39	5	5	4	14
40	5	4	4	13
41	5	5	5	15
42	3	5	4	12
43	5	5	4	14
44	4	5	5	14
45	4	4	4	12
46	5	4	3	12
47	4	5	4	13
48	5	5	3	13
49	4	4	3	11
50	4	5	3	12
51	4	2	2	8
52	2	2	2	6
53	3	4	3	10
54	4	4	3	11
55	3	5	3	11
56	5	5	3	13
57	4	4	4	12
58	5	4	5	14
59	5	4	5	14
60	4	4	4	12

Lampiran 6. Jawaban Responden Variabel Loyalitas (L)

No Responden	L1	L2	L3	L4	Y2
1	5	4	5	5	19
2	4	4	5	5	18
3	4	4	2	2	12
4	4	3	4	3	14
5	4	3	5	3	15
6	4	4	5	5	18
7	3	3	1	2	9
8	5	5	4	4	18
9	5	5	5	5	20
10	5	5	4	4	18
11	4	3	5	5	17
12	4	4	5	5	18
13	4	5	5	5	19
14	4	3	5	3	15
15	4	4	5	4	17
16	4	4	4	3	15
17	4	4	4	4	16
18	3	3	2	2	10
19	5	5	4	4	18
20	3	4	5	3	15
21	5	4	4	4	17
22	4	4	5	5	18
23	4	4	4	4	16
24	5	5	4	5	19
25	4	5	5	5	19
26	5	4	4	5	18
27	4	4	4	4	16
28	4	4	5	5	18
29	5	5	5	5	20
30	5	4	5	5	19

31	5	5	4	4	18
32	3	3	1	2	9
33	5	5	4	4	18
34	4	4	5	4	17
35	3	3	4	3	13
36	3	4	4	3	14
37	4	4	4	4	16
38	4	3	5	3	15
39	5	5	5	4	19
40	5	5	4	4	18
41	5	4	5	5	19
42	4	4	5	4	17
43	5	4	5	4	18
44	5	5	5	5	20
45	4	4	4	4	16
46	4	5	4	3	16
47	5	5	5	4	19
48	5	5	5	3	18
49	4	4	4	3	15
50	4	3	5	3	15
51	3	3	2	2	10
52	2	2	2	2	8
53	3	3	4	3	13
54	4	5	4	3	16
55	4	3	5	3	15
56	3	3	5	3	14
57	5	5	4	4	18
58	4	5	4	5	18
59	4	5	4	5	18
60	4	4	4	4	16

Lampiran 7. Hasil Analisis PLS

Nilai *Outer Loading*

	AK	KP	L	TR
AK1	0.946			
AK2	0.732			
AK3	0.883			
AK4	0.802			
AK5	0.924			
KP1		0.737		
KP2		0.791		
KP3		0.895		
L1			0.849	
L2			0.765	
L3			0.746	
L4			0.880	
TR1				0.921
TR2				0.946
TR3				0.841
TR4				0.838

Nilai *Composite Reliability*

	Composite Reliability
AK	0.934
KP	0.851
L	0.885
TR	0.937

Nilai Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)
AK	0.741
KP	0.657
L	0.659
TR	0.788

Nilai R-Square

	R Square
KP	0.623
L	0.891

Nilai Cross Loadings

	AK	KP	L	TR
AK1	0.946	0.726	0.784	0.291
AK2	0.732	0.545	0.666	0.121
AK3	0.883	0.674	0.611	0.269
AK4	0.802	0.507	0.525	0.346
AK5	0.924	0.719	0.753	0.448
KP1	0.711	0.737	0.620	0.315
KP2	0.377	0.791	0.746	0.409
KP3	0.698	0.895	0.880	0.479
L1	0.809	0.721	0.849	0.436
L2	0.659	0.578	0.765	0.344
L3	0.377	0.791	0.746	0.409
L4	0.698	0.895	0.880	0.479
TR1	0.428	0.543	0.606	0.921
TR2	0.360	0.489	0.510	0.946
TR3	0.245	0.332	0.267	0.841
TR4	0.091	0.330	0.338	0.838

Nilai Result for Path Coefficient

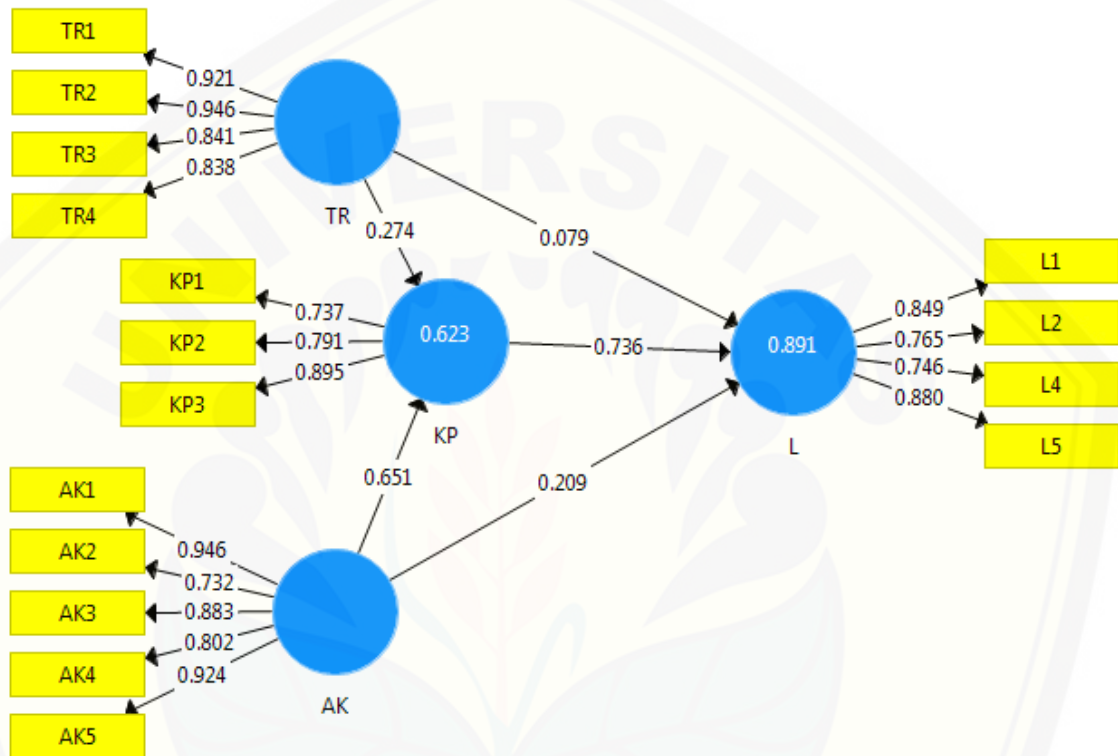
	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics (O...
AK -> KP	0.651	0.651	0.079	8.198
AK -> L	0.209	0.212	0.086	2.436
KP -> L	0.736	0.732	0.088	8.316
TR -> KP	0.274	0.275	0.097	2.817
TR -> L	0.079	0.082	0.055	1.430

Nilai Result for outer Loadings

	Original Sampl...	Sample Mean (...)	Standard Devia...	T Statistics (O...
AK1 <- AK	0.946	0.946	0.013	71.599
AK2 <- AK	0.732	0.723	0.064	11.374
AK3 <- AK	0.883	0.883	0.037	23.574
AK4 <- AK	0.802	0.802	0.054	14.721
AK5 <- AK	0.924	0.926	0.018	52.308
KP1 <- KP	0.737	0.733	0.072	10.233
KP2 <- KP	0.791	0.772	0.090	8.755
KP3 <- KP	0.895	0.897	0.020	44.373
L1 <- L	0.849	0.848	0.037	23.062
L2 <- L	0.765	0.758	0.062	12.419
L3 <- L	0.746	0.725	0.094	7.898
L4 <- L	0.880	0.880	0.023	37.591
TR1 <- TR	0.921	0.922	0.021	43.145
TR2 <- TR	0.946	0.938	0.043	22.124
TR3 <- TR	0.841	0.820	0.096	8.714
TR4 <- TR	0.838	0.836	0.035	23.704

Output Hasil Analisis PLS

Outer Model



Output Hasil Analisis PLS

Inner Model

